

**UNIVERSITAS INDONESIA**

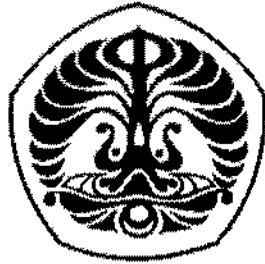
**KEPENTINGAN JEPANG DALAM BANTUAN EKONOMI  
TERHADAP INDONESIA DI MASA KRISIS ASIA (1997-2000)**

**TESIS**

**PRAMADAFI IRAWAN, S. Sos  
0806450123**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH JEPANG  
DEPOK  
JANUARI 2010**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEPENTINGAN JEPANG DALAM BANTUAN EKONOMI  
TERHADAP INDONESIA DI MASA KRISIS ASIA (1997-2000)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister**


**PRAMADAFI IRAWAN, S. Sos  
0806450123**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH JEPANG  
KEKHUSUSAN DIPLOMASI JEPANG  
DEPOK  
JANUARI 2010**

**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Pramadafi Irawan, S. Sos.  
**NPM** : 0806450123  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 5 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Pramadafi Irawan  
NPM : 0806450123  
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang  
Judul Tesis : Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi  
Terhadap Indonesia Di Masa Krisis Asia  
(1997- 2000)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Tirta N. Mursitama, PhD

Penguji : Prof. Dr. Noerhadi Magetsari

Penguji : Dr. Sudung Manurung

Penguji : Dr. Makmur Keliat

*(Tirta)*

*(Magetsari)*

*(Manurung)*

*(Keliat)*

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 5 Januari 2010

## KATA PENGANTAR/ UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Jurusan Diplomasia pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Ketua Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia Bapak Dr. Sudung Manurung dan Sekretaris Program Ibu Dra Kurniawati Iskandar M.A.
- (2) Bapak Tirta N. Mursitama, PhD, sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
- (3) Bapak Prof. Dr. Noerhadi Magetsari dan Bapak Dr. Makmur Keliat sebagai dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan masukan pada tesis ini.
- (4) Bapak Syamsul Hadi, PhD, Bapak Dr. Abdul Irsan, Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, dan seluruh dosen Kajian Wilayah Jepang UI yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
- (5) Para teman seangkatan Kajian Wilayah Jepang UI 2008, para Sempai, Kohai dan seluruh staf (Mba Dina, Pak Bandi, Pak Woto, Mba Tias) yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas bantuan yang selama ini telah diberikan.
- (6) Orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan : (Alm.) Mama (sudah kutunaikan salah satu amanahmu, Semoga kita semua Khusnul Khatimah), Bapak, Adik-adikku, adik iparku, keponakanku serta seluruh keluarga besarku.
- (7) Sahabat-sahabat : Fajar M. Yusuf, Wahyu H, Darius Erlangga, Andri.R. Wibowo, Novel Assegaf, Novend W.I. Hippy, Altaf M. P, dan semuanya yang selalu berada di jalan Allah untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Amin.

Depok 5 Januari 2010

Pramadafi Irawan, S. Sos

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pramadafi Irawan, S. Sos  
NPM : 0806450123  
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang  
Kekhususan : Diplomasia Jepang  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap  
Indonesia Di Masa Krisis Asia (1997-2000)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 5 Januari 2010  
Yang menyatakan



(Pramadafi Irawan, S. Sos)

## ABSTRAK

**Nama** : Pramadafi Irawan  
**Program Studi** : Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang  
**Judul** : Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia Di Masa Krisis Asia 1997-2000

Krisis Asia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi yang cukup menarik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, likuidasi 16 bank di Indonesia, maraknya demonstrasi, hingga pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B.J. Habibie merupakan dampak dari krisis Asia. Tesis ini menjelaskan mengenai Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia di Masa Krisis Asia Tahun 1997-2000. Dalam hal ini berbagai bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia didalamnya merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri yang juga diperkuat dengan beberapa teori lainnya sehingga pada hasil penelitian dapat terlihat mengenai kepentingan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997-2000.

**Kata Kunci** : Jepang, Indonesia, krisis Asia tahun 1997-2000, kepentingan Jepang, bantuan Jepang.

## ABSTRACT

**Name** : **Pramadafi Irawan**  
**Study Program** : **Japanese Area Studies**  
**Title** : **Japan Interest in Economics Assistance to Indonesia  
in The Asian Crisis 1997-2000**

Asian Crisis in 1997 was an interesting economic phenomenon. A weakening of the rupiah exchange to US Dollar, liquidation of 16 banks in Indonesia, widespread demonstration and the turn off the leadership president from Soeharto to BJ Habibie were the impact of Asian Crisis. This Thesis describes The Japan interest in economic aids to Indonesia in time of Asian Crisis 1997-2000. In this case, The Japan economic assistance to Indonesia is a part of the national interest of Japan. One of the theory used in this research is theory of foreign policy and also reinforced by some others theory so the research result can be seen on Japan interest to Indonesia in time of Asian crisis in 1997-2000.

**Keywords:** **Japan, Indonesia, Asian crisis 1997-2000, Japan interest, Japan assistance.**

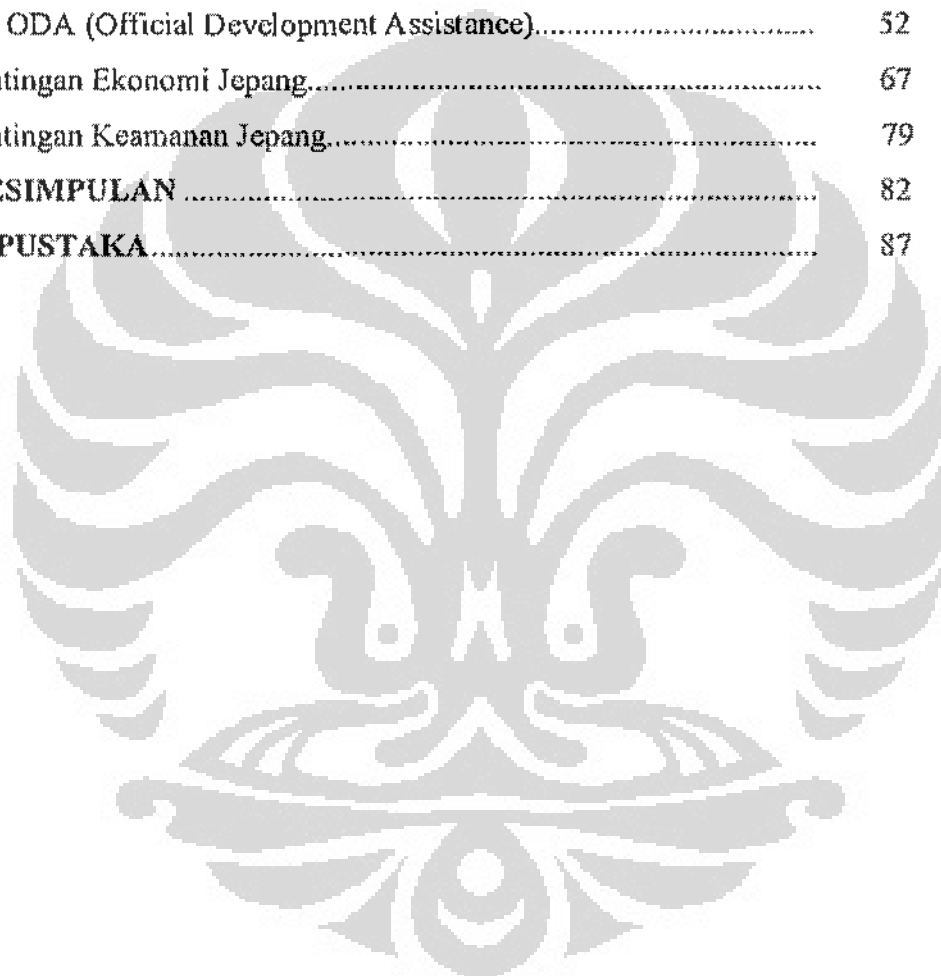
+



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan .....	5
I.3 Kajian Literatur.....	5
I.4 Kerangka Teori .....	7
I.5 Hipotesa .....	10
I.6 Tujuan Penelitian .....	10
I.7 Signifikansi Penelitian.....	10
I.8 Ruang Lingkup .....	11
I.9 Metode Penelitian .....	11
I.10 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG</b> .....	14
II. 1 Sejarah Hubungan Indonesia dan Jepang .....	14
II. 2 Kepentingan Nasional Jepang .....	22
<b>BAB III KRISIS ASIA TAHUN 1997-2000</b> .....	29
III. 1 Krisis Asia Tahun 1997-2000 .....	29
III. 2 Indonesia dan Krisis Asia .....	31
III. 3 Jepang dan Krisis Asia.....	36

<b>BAB IV KEPENTINGAN JEPANG DALAM BANTUAN EKONOMI TERHADAP INDONESIA DI MASA KRISIS ASIA 1997-2000.....</b>	<b>43</b>
IV.1 Bantuan Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia .....	43
IV.1.1 Miyazawa Plan.....	48
IV.1.2 Special Yen Loan Facility.....	51
IV.1.3 ODA (Official Development Assistance).....	52
IV.2 Kepentingan Ekonomi Jepang.....	67
IV.3 Kepentingan Keamanan Jepang.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Pertukaran uang Baht-Dollar .....	30
Tabel III.2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara ASEAN Periode tahun 1996-1999 (Persen per tahun).....	31
Tabel IV.1	Penyaluran ODA.....	45
Tabel IV.2	Nilai Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia (Dalam US\$ juta). .....	46
Tabel IV.3	Bantuan Miyazawa Plan Yang Diberikan Jepang Untuk Indonesia Berdasarkan Keputusan Tanggal 5 Februari 1999 .....	50
Tabel IV.4	Pinjaman Yen Terhadap Indonesia Tahun 1997-Tahun 2000 (Dalam Ratus Juta Yen).....	54
Tabel IV.5	Kerjasama Teknik Jepang Tahun 1997-Tahun 2000 (Dalam Ratus Juta Yen).....	57
Tabel IV.6	Bantuan Hibah Jepang Kepada Indonesia Tahun 1997-Tahun 2000 (Dalam Ratus Juta Yen).....	59
Grafik IV.1.	Pinjaman Yen, Hibah dan Bantuan Teknis Tahun 1997-Tahun 2000 (Dalam Ratus Juta Yen).....	64
Grafik IV.2	Jumlah Proyek.....	66
Tabel IV.7	Ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN Periode Tahun 1990-1996 (Dalam juta US\$).....	69
Tabel IV.8	Impor Jepang dari negara-negara ASEAN Periode Tahun 1990-1996 (Dalam juta US\$). .....	70
Tabel IV.9	Ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN dan Persentase Perubahannya Periode Tahun 1996-1998 (Dalam juta US\$).....	71
Tabel IV.8	Impor Jepang ke negara-negara ASEAN dan Persentase Perubahannya Periode Tahun 1996-1998 (Dalam juta US\$).....	72
Tabel IV.9	Nilai Investasi Langsung Jepang ke Negara-Negara ASEAN Periode Tahun 1989-1997 (Dalam Juta US\$) .....	73
Tabel IV.10	Nilai Investasi Langsung Jepang ke Negara-Negara ASEAN Dan Persentase Perubahannya Periode Tahun 1996-1998 (Dalam Juta US\$).....	76
Tabel IV.11	Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia.....	81

## Bab I

### Pendahuluan

#### I.1 Latar Belakang

Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bilateral. Hubungan bilateral tersebut hingga saat ini dikenang sebagai hubungan persahabatan antar kedua negara yang sudah mencapai jangka waktu lebih dari 50 tahun. Dalam perkembangannya, Indonesia dan Jepang melakukan berbagai kerjasama antara lain: dalam bidang ekonomi, budaya hingga lingkungan hidup. Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Dalam hal ini, jika dilihat dari persahabatan antar negara yang ada hingga saat ini, semua yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, masing-masing negara memberikan itikad baik dan sikap terbaiknya.

Di masa lalu, Jepang merupakan salah satu negara yang pernah memiliki militer yang cukup kuat pada masa Perang Dunia ke II. Pada Perang Dunia ke II tersebut, Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan dibuatlah artikel 9 yang isinya Jepang tidak diperbolehkan mengoptimalkan kekuatan militernya, tidak boleh memiliki senjata nuklir, dan militer Jepang harus di bawah kontrol Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Article 9.

*"Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of aggression of the state will not be recognized."*<sup>2</sup> (*The Japanese Constitution*)

(Dengan maksud yang sungguh-sungguh untuk menciptakan perdamaian internasional berlandaskan keadilan dan ketertiban, maka rakyat Jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak bangsa yang berdaulat dan menolak pula penggunaan ancaman atau kekuatan sebagai cara untuk mengatasi persengketaan-

<sup>1</sup> Gabe. Masaaki, *Japan and Okinawa*, (London and New York: Routledge Curzon, 2003), hal: 63.

<sup>2</sup> Abdul Irsan, *Jepang: Politik Domestik, Global, & Regional*, (Makasar: Hasanuddin University Press, 2005), hal.87.

persengketaan internasional. Untuk mewujudkan maksud tersebut, angkatan-angkatan darat, laut dan udara maupun potensi perang lainnya tidak akan pernah diadakan. Hak berperang yang ada pada negara tidak akan diakui).

(Konstitusi Jepang)

Setelah itu, Jepang berubah haluan: dari negara yang mengedepankan kekuatan militernya menjadi negara yang mengedepankan ekonominya, dari negara yang berorientasi perang menjadi negara yang berorientasi sebuah perdamaian, dari negara imperialis menjadi negara yang berasaskan konstitusi demokrasi. Dengan adanya tujuan yang sudah terlihat jelas dari sikap pandang negara Jepang dalam berhubungan dengan tiap-tiap negara sudah tentu tidak terlepas dari kepentingan ekonomi negara Jepang itu sendiri. Hingga kini Jepang merupakan salah satu dari sekian banyak negara maju yang ada di dunia. Namun dibalik kemajuan tersebut, Jepang memiliki keterbatasan berupa sumber daya alam dan kebutuhan akan tenaga kerja yang murah sehingga mempengaruhi kondisi politik luar negerinya.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya Jepang melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang tentunya bersifat menguntungkan.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena yang cukup menarik. Krisis finansial Asia adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter di Indonesia. Mata uang rupiah melemah dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/ dollar AS pada 22 Januari 1998.

Sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an perekonomian di negara-negara Asia Timur tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara di kawasan lainnya di dunia.<sup>4</sup> Keberhasilan pencapaian ekonomi tersebut tanpa disadari menimbulkan sikap tidak mawas diri dengan keadaan yang berpotensi menimbulkan kerentanan, yang mengakibatkan para pengambil kebijakan terbuai dengan keadaan dengan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* dan pengambilan

<sup>3</sup> Robert A. Scalapiano, *The Foreign Policy of Modern Japan* (London: University of California Press, 1977), hal. 17.

<sup>4</sup> Shinta R.I. Soekro, *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 1.

kebijakan yang kurang hati-hati baik dari pelaku ekonomi maupun pengambil kebijakan. Tanda-tanda krisis mulai nampak pada bulan Juli tahun 1997, menyusul terjadinya gejolak nilai tukar yang meruntuhkan perekonomian Thailand. Mata uang regional mulai mengalami tekanan depresiatif dan terus bergejolak sebagai pertanda terjadinya efek menular dikawasan regional Asia. Sehingga menimbulkan krisis moneter di kawasan Asia. Krisis tersebut memicu pembalikan modal keluar yang memperburuk tekanan terhadap mata uang negara-negara dikawasan Asia. Krisis yang melanda saat itu memangkas secara signifikan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sehingga menempatkan Indonesia kembali pada klasifikasi negara miskin.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Jepang memiliki kepentingan terhadap negara-negara di Asia. Di kawasan Asia Tenggara ada ribuan perusahaan Jepang yang memakai buruh murah dan fasilitas tanah maupun listrik yang murah, tetapi bahan bakunya sebagian besar masih import.<sup>6</sup> Di Indonesia, pada masa krisis moneter tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 puluhan bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, berguguran. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga bangkrut. Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.<sup>7</sup>

Di satu sisi, hubungan Indonesia Jepang terciirkan dengan adanya ketergantungan Indonesia pada modal, teknologi dan bantuan keuangan Jepang. Di sisi lain Indonesia juga sangat penting bagi Jepang dengan beberapa alasan antara lain Jepang menyerap 70% ekspor minyak Indonesia, Jepang juga merupakan konsumen utama kayu dari Indonesia untuk sektor real estate mereka. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 impor kayu Jepang dari Indonesia senilai lebih dari US\$ 1 milyar dan Indonesia bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga merupakan tujuan utama relokasi industri-industri Jepang.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Wall Street Journal 3 September 1997

<sup>7</sup> [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm)

<sup>8</sup> Hadi, *Op Cit*, hal. 329.

Bisa dikatakan ekonomi Jepang juga tergantung dari pasar luar negeri, salah satunya Indonesia. Jepang terpengaruh dengan adanya krisis Asia karena ekonominya berperan penting di wilayah Asia. Negara-negara Asia biasanya menjalankan defisit perdagangan dengan Jepang karena ekonomi Jepang dua kali lebih besar dari negara-negara Asia lainnya bila dijumlahkan. Sekitar 40 persen ekspor Jepang ke Asia. Pertumbuhan nyata GDP (*Gross Domestic Product*) Jepang melambat di tahun 1997, dari 5 persen ke 1,6 persen dan turun menjadi resesi pada 1998.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan kebijakan politiknya di Asia, Jepang lebih banyak menekankan untuk melaksanakan kebijakan dengan mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dan kebudayaan daripada dalam bidang politik. Sikap ini lebih ditujukan untuk ikut menciptakan stabilitas politik di kawasan Asia dan memungkinkan Jepang memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi serta berusaha agar tercipta kondisi negara-negara Asia Tenggara yang berhaluan non-komunis.<sup>10</sup> Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar produk-produk Jepang dan juga penyuplai bahan-bahan pertambangan dan galian ke Jepang, dapat dikatakan secara tidak langsung krisis yang terjadi di Indonesia maupun di kawasan Asia turut mempengaruhi perekonomian Jepang itu sendiri.

Di masa krisis Asia tersebut Jepang memberikan berbagai macam bantuan dan kerjasama ekonomi kepada Indonesia. Berbagai macam bantuan dan kerjasama ekonomi tersebut merupakan suatu reaksi dari pemerintah Jepang dalam melihat krisis yang melanda Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, tujuan dari berbagai kerjasama ekonomi Jepang salah satunya adalah dalam rangka promosi produk-produk ekspor dari Jepang itu sendiri.<sup>11</sup> Dalam hal ini mengapa Jepang memberikan berbagai bantuan kepada Indonesia?

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis\\_finansial\\_Asia\\_1997](http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997)

<sup>10</sup> Irsan, *Op Cit*, hal. 163.

<sup>11</sup> Robert M Orr, Jr., Bruce M. Koppel, *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New Era*, (USA: Westview Press, 1993), hal. 2.

## **I.2. Permasalahan**

Permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai apakah kepentingan keamanan dan ekonomi Jepang dalam bantuan ekonomi terhadap Indonesia di masa krisis Asia (1997-2000)?

## **I.3. Kajian Literatur**

Ada dua tesis yang membahas mengenai kebijakan ekonomi dan politik yang dilakukan Jepang di kawasan Asia. Yang pertama adalah tesis mengenai "Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN Pada Akhir 1970-an: Kasus Doktrin Fukuda yang ditulis oleh saudari Aji Anastashia Astriana Hakim. Dalam kasus doktrin Fukuda, terdapat suatu rumusan baru Jepang dalam mengawali kebijakan strategis politik luar negeri guna menjaga hubungan baik dengan negara-negara ASEAN yaitu Jepang merupakan mitra sejajar dengan negara-negara ASEAN yang berdasarkan hubungan dari hati ke hati. Hal ini merupakan suatu reaksi positif dari Jepang guna menjaga citra dan eksistensinya di kawasan ASEAN.

Tesis yang kedua mengenai "Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dan Indonesia dalam Japan Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)." Yang ditulis oleh saudara Agus Haryanto. Dalam tesis ini, ada beberapa temuan, antara lain Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomiannya di Indonesia, Jepang mengamankan kebutuhan gasnya, menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan gas yang cukup besar dan memberikan peluang kerja di Jepang bagi tenaga kerja Indonesia.

Dalam jurnal ekonomi yang dibuat pada tahun 2009 Revrisond Baswir membandingkan Indonesia antara krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan krisis ekonomi tahun 2008/2009 jurnal ini ditulis oleh Revrisond Baswir (Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, UGM, Yogyakarta) mengenai Dampak Kapitalisme Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia yang berisi mengenai latar belakang sejarah (warisan hutang Hindia Belanda 4,3 milyar Gulden sebagai konsekuensi dengan merdekanya Indonesia), hubungan krisis Asia 1997-1999 (dengan semakin besar peran asing di Indonesia sejak krisis Asia seperti privatisasi BUMN, liberalisasi sektor perdagangan, keuangan dan lain sebagainya membuat



ekonomi Indonesia menjadi tergantung dengan ekonomi asing), dampak krisis global (melemahnya nilai rupiah, indeks saham, komoditas ekspor primer Indonesia, bertambahnya skema hutang luar negeri Indonesia dari 60 triliun menjadi 200 triliun, meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan swasta, dan lain sebagainya). Dalam kesimpulannya diharapkan adanya kesadaran dari semua pihak untuk memerdekakan diri dari penjajahan dalam bentuk baru, dan diharapkan adanya konsolidasi serta strategi dari semua elemen bangsa Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik lagi.

Dalam tulisan yang berjudul "Respon IMF terhadap krisis Asia (*The IMF's Responses to the Asian Crisis*),"<sup>12</sup> yang ditulis pada bulan Januari 1999 dijelaskan bahwa terjadinya krisis juga disebabkan kelemahan pengawasan sistem keuangan dikawasan Asia, kewajiban IMF dalam menjaga kestabilan moneter internasional, mengintensifkan konsultasi dengan negara-negara lain yang berkepentingan (agar tidak memberi dampak yang lebih luas lagi), memberikan program-program yang dapat mengatasi krisis (pengetatan kebijakan moneter, reformasi struktural ekonomi sebagai contoh praktek monopoli, transparansi, dan lain sebagainya), koordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dan pelajaran dari krisis Asia antara lain: pengawasan terhadap berbagai kebijakan ekonomi termasuk didalamnya penggunaan dana dan data mengenai cadangan devisa, reformasi sistem keuangan dibawah pengawasan bank dunia, integrasi pasar keuangan internasional yang teratur dan benar, tata pemerintahan yang baik serta pemberantasan korupsi, dan memperbaiki masalah utang swasta dalam rangka memperkuat arsitektur sistem keuangan internasional untuk mengurangi frekuensi dan tingkat gangguan di masa depan.

Dalam KTT Ekonomi Koln G7, tanggal 18-20 Juni tahun 1999.<sup>13</sup> Jepang berkomitmen untuk dapat berperan secara aktif memperkuat arsitektur keuangan internasional. Dalam hal ini memaksimalkan sistem keuangan internasional dengan adanya berbagai reformasi dan perbaikan untuk memperkuat fundamental ekonomi internasional. Dengan adanya kerjasama internasional yang baik dan upaya agar krisis dapat dicegah diperlukan kerjasama internasional antar negara.

<sup>12</sup> <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/asia.HTM>

<sup>13</sup> <http://www.mofa.go.jp/>

Hal ini terdapat dalam enam skala prioritas:

1. Memperkuat dan mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan pengaturan.
2. Meningkatkan transparansi dan mempromosikan praktek-praktek terbaik.
3. Penguatan regulasi keuangan di negara-negara industri.
4. Memperkuat kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan di pasar negara berkembang.
5. Meningkatkan pencegahan krisis dan manajemen, dan melibatkan sektor swasta.
6. Mempromosikan kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan paling rentan.<sup>14</sup>

#### 1.4. Kerangka Teori

Dalam melihat hubungan Indonesia dan Jepang penulis menggunakan berbagai konsep teori. Sebagai negara maju Jepang dikenal sebagai mitra dan sahabat Indonesia yang melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan Indonesia. Selain itu, Jepang ambil bagian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pakct ODA-nya.<sup>15</sup> ODA (*Official Development Assistance*) salah satunya berfungsi sebagai alat Jepang untuk memperbaiki kesalahannya dimasa lalu.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, definisi kebijakan luar negeri adalah:

*"Foreign Policy is a strategi or a planend course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities, aimed, or achieving specifics goals defined in terms of national interest."*<sup>16</sup>

"Kebijakan luar negeri adalah sebuah rencana dan strategi tindakan suatu negara yang dibuat oleh pembuat kebijakan dalam kaitan untuk berhadapan dengan

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mohathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2005), hal. 181.

<sup>16</sup> Jack.C. Plano and Roy Olton, *The International relations Dictionary* (Santa Barbara, California: ABC-Clio Inc, 1982), hal. 7.

negara lain ataupun entitas internasional, rencana tersebut secara khusus menyertakan tujuan yang jelas dalam konteks menjaga kepentingan nasional.”

Dari definisi tersebut Plano dan Olton menjelaskan bahwa dalam dunia internasional yang dinamis sebuah negara harus memiliki rencana dan strategi untuk dapat merepresentasikan kepentingan nasional negara tersebut dengan tepat. Dengan adanya penerapan strategi yang tepat sebuah negara akan mudah beradaptasi dengan negara lain maupun dunia internasional guna mencapai kepentingan nasional negaranya. Dari penjelasan tersebut memberikan sebuah pendapat bahwa kepentingan nasional sebuah negara harus diperjuangkan secara terencana dengan strategi yang tepat sesuai dengan keadaan yang ada. Namun dalam perkembangannya dan juga kenyataannya sebuah negara juga harus melakukan kompromi-kompromi politik guna mencapai kepentingan nasionalnya dengan berbagai pertimbangan dan perkembangan yang ada. Atas dasar kompromi tersebut Graham Modelski memiliki pendapat sebagai berikut:

*“Foreign Policy is the system of activities evolved by communities for changing the behaviour of other states and for adjusting their own activities to the international environment.”<sup>17</sup>*

“Kebijakan luar negeri adalah sistem tingkah laku suatu negara yang dilakukan negara untuk merubah perilaku negara lain dan untuk mengatur serta menyesuaikan tingkah laku negara tersebut dalam lingkungan internasional.”

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan dan dengan maksud untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional.

Selain itu menurut Robert Gilpin:

*“In every international system there are continual occurrences of political, economics, and technological changes that promises gains and losses for one or another actor in every system therefore a process of disequilibrium and adjustment is constantly taking place.”<sup>18</sup>*

“Dalam suatu sistem internasional akan terjadi perubahan politik, ekonomi dan teknologi yang berkelanjutan yang menghadirkan keuntungan dan kerugian bagi

<sup>17</sup> Graham Modelski, *Foreign Policy Decision Making* (New York: St Martin, 1997), hal. 54.

<sup>18</sup> Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (New York: Cambridge University Press, 1981), hal. 13.

masing-masing aktor internasional dalam suatu sistem untuk itu adanya sebuah penyesuaian dan penyeimbangan adalah suatu keharusan.”

Dalam melihat dan merumuskan berbagai kebijakan ekonomi maupun bantuan ekonomi yang dilakukan terhadap Indonesia, Jepang melakukan penyesuaian dengan sistem, kondisi, situasi dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini Jepang mencermati keadaan yang terjadi di Indonesia. Sebagai bagian dari elemen ekonomi Jepang, Jepang berkepentingan dalam memberikan berbagai bantuan ekonominya baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Dengan melihat krisis yang melanda Asia termasuk didalamnya Indonesia, Jepang bereaksi dalam menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini, Jepang memberikan berbagai bantuan terhadap Indonesia pada masa krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Indonesia merupakan bagian dari elemen ekonomi Jepang sehingga Jepang berkepentingan dalam membantu Indonesia.

Dalam terminologi *Keizai Kyoryoku* (kerjasama ekonomi) Jepang, menurut David Arase ada dua tujuan ODA (*Official Development Assistance*) Jepang. Pertama, ODA dipergunakan sebagai alat untuk menarik simpati internasional. Kedua, ODA dipergunakan sebagai kebijakan untuk membantu memperlancar investasi dan perdagangan. Dengan cara ini maka kelompok bisnis Jepang memiliki posisi tawar yang tinggi di negara berkembang dalam mencari keuntungannya dan memberikan pendapatan bagi negara. Keterkaitan kepentingan antara pemerintah dan swasta menyebabkan pemberian ODA di prioritaskan kepada negara yang memiliki faktor ekonomi yang menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa pemberian ODA dipergunakan sebagai alat untuk mempermudah diplomasi Jepang untuk memperoleh kepentingannya. David Arase mencirikan adanya empat motivasi bantuan Jepang ke negara lain. Empat motivasi bantuan tersebut antara lain motivasi strategis, motivasi kemanusiaan, motivasi ekonomi dan motivasi komersial.<sup>19</sup> Motivasi strategis berkaitan dengan adanya kepentingan-kepentingan strategis baik ekonomi maupun keamanan. Motivasi kemanusiaan berkaitan dengan adanya bantuan kesehatan dan penanggulangan bencana alam. Motivasi ekonomi merupakan motivasi yang berkaitan dengan

<sup>19</sup> David Arase, *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid* (London: I.B. Tauris, 1995), hal. 11.

berbagai kepentingan ekonomi sedangkan motivasi komersial merupakan motivasi yang didasarkan dalam mencari keuntungan ekonomi.

Menurut Sueo Sudo tujuan utama politik luar negeri Jepang adalah mempromosikan pembangunan ekonomi melalui pencarian sumber-sumber alam serta pasar luar negeri yang menguntungkan.<sup>20</sup> Oleh karena itu Sueo Sudo menyimpulkan bahwa Jepang memberikan bantuannya guna memenuhi kepentingannya.<sup>21</sup> Sedangkan bantuan Jepang menurut Juichi Inada bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Jepang seperti ekspansi pasar, ekspor, dan pengamanan sumber daya alam. Selain itu bantuan Jepang juga ditujukan untuk menguatkan hubungan ekonomi antara Jepang dengan negara berkembang dan citra baik Jepang dalam dunia internasional.<sup>22</sup>

#### **I. 5. Hipotesa**

Berbagai bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia pada masa krisis Asia (1997-2000) terkait dengan kepentingan ekonomi dan keamanan Jepang terhadap Indonesia.

#### **I.6. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mendesripsikan kepentingan Jepang terhadap berbagai bantuan yang diberikan kepada Indonesia di masa krisis Asia dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Adapun Kepentingan Jepang terhadap Indonesia meliputi dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor keamanan.

#### **I.7. Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif secara akademis dalam melihat berbagai kepentingan Jepang di masa krisis Asia agar dapat dijadikan pelajaran sehingga dapat mengoptimalkan berbagai bentuk kerjasama antar kedua negara dan dapat melihat negara Jepang dalam memainkan

---

<sup>20</sup> Sueo Sudo, *The Fukuda Doctrine and ASEAN Dimension in Japanese Foreign Policy* (Singapura: Institute of Asian Studies, 1992), hal. 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>22</sup> Juici Inada, *Japan's ODA to ASEAN Countries* (Tokyo: The United Nation University, 1990).

perannya terhadap Indonesia serta dapat melihat Jepang sebagai sebuah negara yang menggunakan kekuasaannya melalui bidang ekonomi. Dalam hal ini, diharapkan sumbangan praktisnya antara lain: dapat mengenal dan mengantisipasi apabila terjadi gejala krisis di masa yang akan datang, mengenal Jepang dan Indonesia lebih mendalam sehingga dapat mengetahui bahwa Indonesia juga memiliki posisi tawar dalam berbagai perjanjian kerjasama dengan Jepang dan dapat mengevaluasi serta mengoptimalkan berbagai perjanjian dan kerjasama dengan Jepang di masa yang akan datang.

### 1.8. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada masa krisis Asia (kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000) mengenai kepentingan Jepang dalam bantuan ekonomi terhadap Indonesia.

### 1.9. Metoda Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi dengan mengumpulkan, menyusun, memahami data-data, menganalisisnya serta mendeskripsikan sebuah situasi dan kejadian.<sup>23</sup> Selain itu juga digunakan studi kepustakaan/ *Library Research* dengan menekankan kepada pustaka sebagai objek studi yang dianalisa.<sup>24</sup> Data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal, koran, situs internet, dokumen, maupun berbagai data lain yang dapat menunjang penelitian. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah suatu teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi dari bahan cetak (buku, artikel, dan lain sebagainya). Dan prosedur dari *content analysis* tersebut:

#### 1. Menentukan tujuan analisis

Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi tujuan analisisnya untuk dapat mengumpulkan berbagai informasi dan melihat dari berbagai tema yang ada.

<sup>23</sup> Earl Babbie, *The Practice of Social Research 10<sup>th</sup> Edition*, (USA:Thompson Learning, 2004), hal. 89.

<sup>24</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 4.

## 2. Mengumpulkan data

Membaca, mengkaji dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber.

## 3. Mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual.

Menghubungkan data dengan objek yang diteliti

## 4. Mereduksi data.

Melakukan penyaringan data mana yang digunakan (*include*) dan mana yang tidak digunakan (*exclude*)

## 5. Memberi kode pada data.

Membaca semua data dan memberi kode sesuai topik

## 6. Menganalisis dan menafsirkan data.

Menganalisis data, menafsirkan, membandingkan dengan berbagai sumber lain dan mengambil sebuah kesimpulan.<sup>25</sup>

### I.10. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini secara sistematika dibagi menjadi lima bab yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, kajian literatur, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG**

Dalam melihat Indonesia dan Jepang tidak lepas dari konteks sejarah dan kepentingan nasional antara Jepang dan Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Jepang serta bagaimana kepentingan nasional Jepang.

<sup>25</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Depok: DIA FISIP UI, 2006), hal. 61.

### **BAB III : KRISIS ASIA TAHUN 1997- TAHUN 2000**

Bab ini menggambarkan krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 merupakan sebuah peristiwa dimana pada saat itu terjadi sebuah fenomena ekonomi yang mengakibatkan gejolak perekonomian di negara-negara Asia. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, Indonesia dan krisis Asia serta Jepang dan krisis Asia.

### **BAB IV : KEPENTINGAN JEPANG DALAM BANTUAN EKONOMI TERHADAP INDONESIA DI MASA KRISIS ASIA TAHUN 1997 – TAHUN 2000**

Bab ini menggambarkan berbagai bantuan dan kerjasama Jepang terhadap Indonesia. Bagaimana bentuk bantuan dan kerjasama Jepang terhadap Indonesia dan kepentingan ekonomi maupun keamanan Jepang terhadap Indonesia akan dibahas dalam bab ini.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan pembuktian hipotesa dari bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga membahas mengenai kaitan antara teori dengan kesimpulan untuk menjelaskan hipotesa serta pendapat dari penulis.



## BAB II HUBUNGAN INDONESIA DAN JEPANG

Dalam melihat hubungan Indonesia dan Jepang tidak lepas dari konteks sejarah dan kepentingan nasional antara Jepang dan Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Jepang serta bagaimana kepentingan nasional Jepang.

### II.1 Sejarah Hubungan Indonesia dan Jepang

Hubungan atau lebih tepat disebut keterkaitan hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang sudah berlangsung sejak Indonesia masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Tahun 1868 merupakan peristiwa titik balik sejarah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Jepang. Peristiwa ini disebut Restorasi Meiji. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi, atau Pembaruan, adalah rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai dengan tahun 1869, tiga tahun yang mencakup akhir Zaman Edo dan awal Zaman Meiji. Restorasi ini merupakan akibat langsung dari dibukanya Jepang kepada kedatangan kapal dari dunia Barat yang dipimpin oleh perwira angkatan laut asal Amerika Serikat, Matthew Perry.

Pada tahun 1868 Kaisar Meiji mengumumkan rencana politik pemerintahan baru yang dikenal dengan 5 pasal dekrit dengan bentuk bersumpah pada dewa. Didalam 5 pengumuman resmi tersebut kaisar mengadakan tukar pikiran dengan berbagai elemen masyarakat Jepang untuk mengembangkan pembangunan politik, ekonomi dan mengumumkan pada seluruh dunia bahwa mereka akan membangun negaranya dengan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup> Jepang kemudian mulai mengembangkan industrinya dengan terlebih dahulu membangun industri tekstil dan membentuk kartel yang dikuasai para konglomerat. Jepang meniru pola pembangunan industri di Inggris.

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A. Pengantar Sejarah Jepang I (Terjemahan dari, Nihon Jijou Shirūzu Nihon no Rekishi, Nihongo Kyoiku Gakkai, 1988), (Jakarta: 2001) hal. 109.

Dalam periode Meiji, Jepang dengan cepat berkembang menjadi negara modern dan memperhatikan kekuatan militernya dengan tujuan utama untuk mengimbangi dan menyamai kekuatan barat. Jepang cenderung meniru pembangunan angkatan darat dengan pola Jerman dan angkatan laut dengan pola Inggris. Jepang mengirimkan perwira-perwiranya dilatih di Jerman dan di Inggris. Secara sistematis dan rencana jangka panjang mengirimkan pemuda-pemudanya belajar di berbagai negara Eropa. Faktor penopang keberhasilan restorasi/pembaharuan di Jepang adalah kenyataan bahwa di Jepang tidak pernah terjadi konflik ideologi seperti yang banyak dialami banyak negara di dunia.

Berbagai bantuan asing juga dibatasi untuk menghindari ketergantungan Jepang pada pihak luar negeri. Faktor lainnya adalah nilai yang terdapat di kalangan masyarakat Jepang yang sangat menghormati kedudukan kaisar sebagai kepala negara karena dianggap sebagai sumber spiritual selain itu masyarakat Jepang juga memiliki rasa nasionalisme kebangsaan yang kuat dalam mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara. Kemajuan militer Jepang menyebabkan Jepang memiliki pendirian untuk bersaing dengan kekuatan barat ( Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Rusia) di luar wilayah Jepang.

Kemenangan Jepang dalam perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai dengan tahun 1905 yang dimenangkan oleh Jepang memberikan reputasi bahwa Jepang adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan politik dan militer yang harus diperhitungkan. Selain itu, kemenangan Jepang terhadap Rusia memberikan pengaruh terhadap bangsa-bangsa lain di Asia yang pada saat itu sedang menderita akibat penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa bahwa bangsa Asia ternyata mampu mengalahkan bangsa Eropa dan memunculkan anggapan dan harapan bahwa Jepang dapat memimpin bangsa Asia menuju kepada kemajuan.<sup>27</sup> Antara tahun 1890 sampai dengan tahun 1912 Jepang sudah tumbuh berkembang menjadi kekuatan politik, ekonomi dan militer.

Dalam perkembangannya terjadi rivalitas antara angkatan darat Jepang dengan angkatan laut Jepang. Dalam menghadapi perkembangan teknologi angkatan laut Jepang merubah penggunaan bahan baku energi untuk kapal-kapal perangnya dari batubara menjadi minyak. Angkatan laut Jepang mulai

<sup>27</sup> Abdul Irsan, *Jepang: Politik Domestik, Global dan Regional* (Makassar: Hasanudin University Press, 2005), hal. 150.

memikirkan bagaimana mendapat pasokan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perangnya. Sementara pihak Angkatan darat Jepang tetap berkonsentrasi melakukan ekspansi ke China dan Korea. Pihak angkatan laut Jepang mulai mengirimkan intelejennya ke Hindia Belanda/ Indonesia yang memiliki sumber minyak, rempah-rempah dan berbagai kekayaan alam lainnya.

Pada kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 Jepang menjajah Indonesia. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengeluarkan pernyataan kalah perang dan tanggal 2 September 1945 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat Missouri Jepang resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Sepanjang bulan September 1945 sampai April 1952 Jepang diperintah oleh pemerintah pendudukan sekutu yang kenyataannya didominasi oleh Amerika Serikat.

Sejak dikuasai oleh sekutu hampir semua kebijakan politik Jepang diputuskan berkaitan langsung dengan kepentingan Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik.<sup>28</sup> Tumbuhnya kembali ekonomi Jepang setelah perang Dunia ke II adalah karena terjadinya perang Korea yang dimulai pada tahun 1950 ketika pasukan Korea Utara komunis menyerang Korea Selatan yang anti komunis. Setelah Jepang memperoleh kedaulatannya dari Amerika Serikat pada tahun 1952 mulai dirintis hubungan kembali dengan pihak Indonesia. Pada permulaannya Jepang merasakan bahwa pemerintah Indonesia dinilai kurang memperhatikan hubungannya dengan Jepang dikarenakan masih ada pengaruh dari perbuatan masa lalu Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia memang sudah ada sejak sebelum pecahnya Perang Dunia ke II. Pada permulaan tahun 1951 pemerintah Jepang berniat membahas tentang keinginannya untuk membantu industri Indonesia dan mengimpor minyak dari Indonesia.

Jepang kemudian melakukan pendekatan kepada Indonesia yang dimulai dengan pembahasan tentang pembayaran pampasan perang di Tokyo pada bulan

---

<sup>28</sup> Ibid hal. 160.

Desember 1951. Menteri Luar Negeri Jepang Okasaki Katsuo berkunjung ke Jakarta pada tahun 1953. Kunjungan itu antara lain menghasilkan persetujuan bantuan Jepang untuk membangun proyek listrik Asahan di Sumatera Utara.<sup>29</sup> Dalam meminimalisasi "sikap permusuhan" perbuatan Jepang di masa lalu pemerintah Jepang melakukan kebijakan politik yang sangat berhati-hati dengan tetap bersikap netral terhadap berbagai isu politik yang melibatkan negara-negara Asia. Kehadiran Jepang dalam konferensi Asia Afrika I di Bandung tahun 1955 diikuti dengan sikap kehati-hatiannya untuk tidak berpihak dalam perdebatan politik dan ideologi. Bahkan ketua delegasi Jepang Takasaki Tatsurosuke dalam suatu kesempatan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan pasukan Jepang selama melakukan pendudukan di Asia dan mengharapkan dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan Asia.

Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang diawali dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Indonesia-Jepang pada 20 Januari 1958 antara Menlu RI Soebandrio dan Menlu Jepang, Aichiro Fujiyama.<sup>30</sup> Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Selama 12 tahun sampai dengan akhir tahun 1970 pemerintah Jepang melunasi kewajiban pembayaran pampasan perang dengan jumlah seluruhnya sebanyak 8038,8 Yen atau setara dengan US\$ 223,08 juta (menurut nilai Dollar saat itu).<sup>31</sup> Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.<sup>32</sup> Titik cerah hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang adalah ketika pada awal masa orde baru perekonomian Indonesia terbilang cukup parah dan hal ini terbukti dengan tingginya angka inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1966 dan hutang luar negeri Indonesia yang harus dibayar sejumlah US \$ 2,2 milyar.<sup>33</sup>

Jepang adalah negara pertama yang mengambil prakarsa untuk membantu ekonomi Indonesia sewaktu Soeharto baru saja memegang tampuk kepemimpinan. Hanya sebulan setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Menteri Luar Negeri Jepang Etsusaburo Shinna menyatakan pemerintahan Jepang

<sup>29</sup> Ibid hal. 161.

<sup>30</sup> <http://www.antara.co.id/print/?id=1201331720>

<sup>31</sup> Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Hubungan Indonesia Jepang* (Jakarta: Kedubes Jepang, 1981), hal. 1.

<sup>32</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html).

<sup>33</sup> Zulkarnaen Djamin, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repalita Pertama* (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 22.

perlu segera mengambil langkah-langkah membantu Pemerintah Indonesia yang baru "meninggalkan politik sebagai Panglima" dan akan mendahulukan pembangunan. Gagasan Tokyo Meeting yang dicanangkan oleh Jepang pada tanggal 19-20 September 1966, dilanjutkan dengan pertemuan di Paris pada tanggal 19-20 Desember 1966 yang kemudian pertemuan ini disebut dengan nama Paris Club.<sup>34</sup>

Pertemuan tersebut menghasilkan penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia. Jepang adalah negara pertama yang bisa menerima pola yang diajukan oleh Paris Club dalam menjadwalkan kembali hutang-hutang Indonesia dan pada akhirnya pertemuan Paris Club tersebut dapat berjalan dengan baik akibat adanya usaha Menteri Keuangan Jepang Fukuda Takeo untuk menghilangkan hambatan-hambatan hukum yang berlaku. Suksesnya Paris Club menjadwalkan utang-utang Indonesia memunculkan *Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)*, yang pada tanggal 24 Maret 1992 dibubarkan yang kemudian terbentuk wadah baru *Consultative Group on Indonesia (CGI)*. Bisa dikatakan atas prakarsa pemerintah Jepang, pada bulan September tahun 1966 diadakan pertemuan multilateral di Tokyo. Pertemuan ini dikenal sebagai Tokyo Club. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara kreditor di luar negara – negara blok komunis yang akan membicarakan masalah ekonomi dan keuangan yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah hutang-hutang Indonesia kepada negara-negara kreditor juga dibicarakan.<sup>35</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pertemuan ini merupakan akar dari terbentuknya *Inter Government Group on Indonesia (IGGI)* yaitu suatu badan internasional yang setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia sebagai dana pelengkap bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu anggota utama dalam *IGGI*, Jepang memegang peran utama dalam memberikan bantuannya kepada Indonesia. Dalam hal ini hubungan Indonesia dengan Jepang lebih bersifat ekonomi daripada politik ataupun keamanan.<sup>36</sup> Pada awal pemerintahan Soeharto, Indonesia memilih sistem perekonomian terbuka.

<sup>34</sup> <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=159766&actmenu=39>

<sup>35</sup> Masashi Nishihara, *The Japanese and Soeharto's Indonesia Tokyo Jakarta Relation 1951-1966* (Honolulu: University of Hawaii, 1976), hal. 20.

<sup>36</sup> Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 190.

Dimana dalam sistem perekonomian tersebut terdapat peraturan investasi Luar Negeri no 1/ 1967 memungkinkan investasi luar negeri masuk ke Indonesia.<sup>37</sup> Sehingga arus peningkatan modal Jepang ke Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan Jepang menempatkan dirinya sebagai investor terbesar di Indonesia. Alasan dari Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarik modal asing adalah untuk pembangunan ekonomi di Indonesia dan kebutuhan modal yang semakin meningkat serta sebagai sumber belanja pembangunan negara, modal pembangunan Indonesia dapat diperoleh melalui *Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* dan *Penanaman Modal Asing (PMA)*.<sup>38</sup> Namun demikian, operasionalisasi berbagai perusahaan Jepang di berbagai kawasan di Indonesia mendapat kecaman dan kritikan dari beberapa elemen masyarakat. Berbagai kritikan tersebut muncul karena adanya dua kecenderungan yaitu:

- A. Adanya sistem perdagangan yang relatif kurang seimbang dan lebih banyak menguntungkan pihak Jepang. Hal tersebut terjadi karena meskipun Jepang lebih banyak mengimpor komoditi, namun impor Jepang dari Indonesia adalah bahan-bahan sumber alam yang proses produksinya dikuasai Jepang, namun produk jadinya di ekspor kembali ke Indonesia.
- B. Adanya pola atau sistem pembagian kerja yang cenderung bersifat vertikal yakni dalam hal tersebut pihak Jepang mengolah barang-barang (produk). Sedangkan pihak Indonesia hanya menyediakan bahan-bahan baku dan sumber-sumber alam.<sup>39</sup>

Sistem kerjasama bilateral tersebut dinilai oleh banyak kalangan hanya menguntungkan pihak Jepang saja. Selain itu muncul kecaman sehubungan dengan adanya operasionalisasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia yang dinilai kurang bertanggung jawab karena perusahaan-perusahaan Jepang tersebut dinilai mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem dan lingkungan. Sikap kebencian rakyat Indonesia mencapai

<sup>37</sup> J. Panglaykim, *Japanese Direct Investment In ASEAN: The Indonesian Experience* (Singapore: Maruzen Asia, 1983), hal. 55.

<sup>38</sup> Soeharno Sagir, *Peranan Bantuan Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, PRISMA 1981, hal. 45.

<sup>39</sup> Muchtar Lubis, *Jepang: Dulu Dan Sekarang* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal. ii.

puncaknya dengan timbulnya peristiwa Malari pada tahun 1974.<sup>40</sup> Dimana dalam peristiwa yang terjadi di bulan Januari tahun 1974 ini terjadi kerusuhan di Jakarta yang para pelakunya terdiri dari berbagai elemen masyarakat juga mahasiswa sebagai sebuah bentuk dari rasa ketidakpuasan yang berkaitan dengan adanya dominasi modal asing (terutama modal Jepang), praktek korupsi para elit, serta bangkrutnya industri-industri kecil maupun menengah yang dimiliki pribumi. Dan demonstrasi ini terjadi selama kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di bulan Januari tahun 1974.

Dengan adanya aksi-aksi penentangan terhadap Jepang menyebabkan pemerintah Jepang menyadari perlunya untuk membuat strategi baru dalam meningkatkan hubungan serta kerjasama yang lebih baik lagi. Pada bulan Agustus tahun 1977 Perdana Menteri Takeo Fukuda mengadakan kunjungan kenegaraan ke berbagai kawasan di Asia tenggara termasuk ke Indonesia. Pada saat itu Perdana Menteri Fukuda mengemukakan gagasannya mengenai konsep peningkatan hubungan kerjasama antara Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia berdasarkan pendekatan "hati ke hati" untuk mendekatkan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara/ ASEAN dan menghindari berbagai konflik. Konsep ini disebut Doktrin Fukuda. Pada intinya doktrin Fukuda tersebut mengandung makna:

- A. Jepang menolak peran kekuatan militer dan berusaha untuk memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.
- B. Jepang berusaha sebaik mungkin untuk mengkonsolidasikan kerjasama saling pengertian dan atas dasar hubungan dari hati ke hati dengan negara-negara ASEAN dalam lingkup yang lebih luas tidak hanya bidang politik serta ekonomi saja tetapi juga dalam bidang kebudayaan. Dan hubungan ini merupakan penekanan hubungan persahabatan antara sahabat-sahabat sejati.
- C. Jepang menempatkan dirinya sebagai partner yang sederajat, setingkat dengan ASEAN dalam rangka solidaritas untuk

---

<sup>40</sup> Ibid.

menciptakan perdamaian dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara dan negara-negara di seluruh dunia atas dasar saling pengertian.<sup>41</sup>

Pada awal tahun 1980-an ketika biaya produksi di Jepang meningkat dan revaluasi mata uang yen memaksa para pengusaha Jepang untuk mencari basis produksi diluar Jepang. Investasi Jepang ke Indonesia meningkat pada saat itu hingga tiga kali lipat dari US \$ 55.406 juta di tahun 1980 menjadi US \$ 159.52 juta pada tahun 1981 dan mengalami pasang surut pada tahun berikutnya. Pada tahun 1986 Jepang menanam hampir 40% dari total investasinya di Indonesia, saham tersebut tetap bertahan sebesar 36,5% di tahun 1987 sebelum akhirnya jatuh lagi pada akhir tahun 1980-an.<sup>42</sup> Namun tidak semua paket deregulasi yang diluncurkan pemerintah Indonesia segaris dengan kepentingan para pemodal asing. Paket reformasi perpajakan tahun 1984 misalnya dimaksudkan untuk memperlunak prosedur penarikan pajak, menyederhanakan struktur perpajakan dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktek korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara.

Paket ini juga menurunkan beban pajak pada semua bagian, namun bersamaan dengan hal tersebut insentif *tax holiday* justru ditiadakan. Meningkatnya investasi asing sejak awal 1980-an membuat pemerintah mengabaikan protes yang datang dari para investor asing perihal penghapusan *tax holiday* (pembebasan pajak). Pada tahun 1987 seorang pengusaha Jepang mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan masalah penghapusan *tax holiday* guna mencegah para investor melarikan modalnya ke negara lain.<sup>43</sup> Dalam perkembangannya, hingga periode tahun 1990 sampai dengan krisis moneter tahun 1997 dan akhir tahun 1990-an peran ekonomi Jepang di Indonesia cukup penting.

<sup>41</sup> J. Panglaykim, Op Cit, hal. 95.

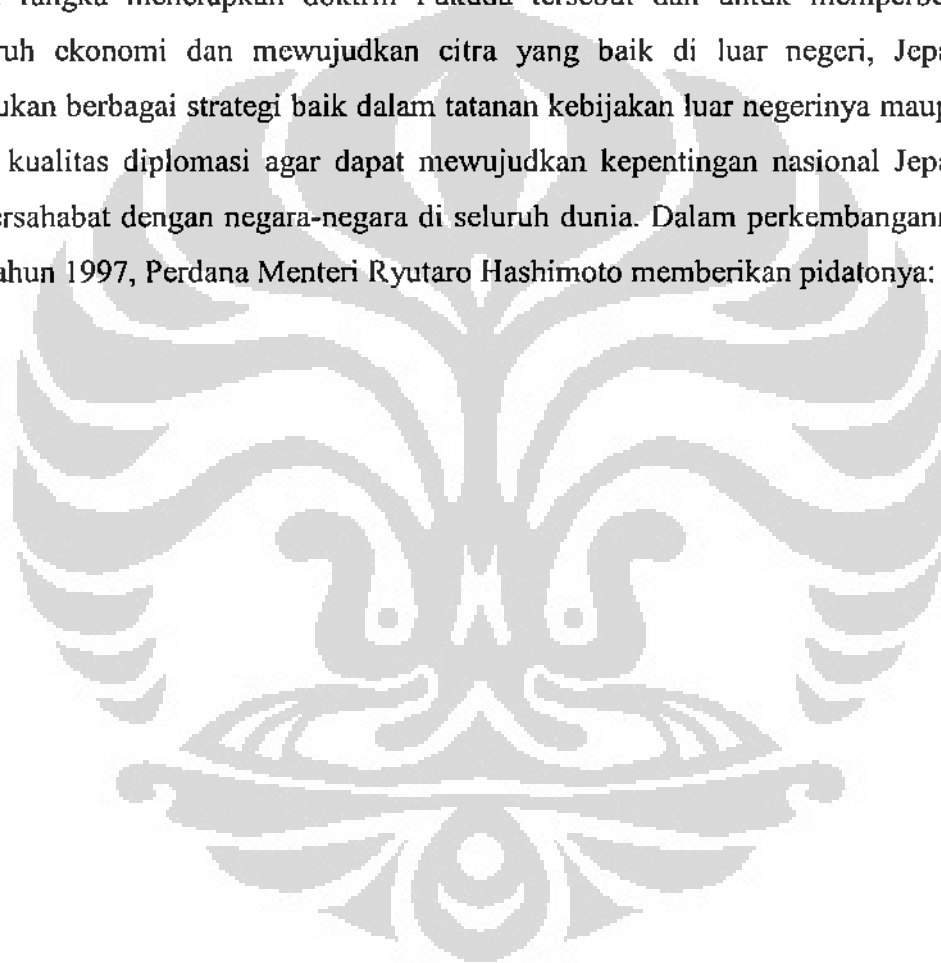
<sup>42</sup> Syamsul Hadi, Op Cit, hal. 253.

<sup>43</sup> Ibid hal. 254.



## II. 2 Kepentingan Nasional Jepang

Kepentingan Nasional Jepang dalam berhubungan dengan negara-negara lain dapat terlihat dari konsep doktrin Fukuda. Dalam pelaksanaannya kepentingan nasional Jepang terkait dengan kebijakan luar negeri Jepang sebagai perwujudan kepentingan nasional Jepang dalam kancah dunia internasional. Dalam rangka menerapkan doktrin Fukuda tersebut dan untuk memperbesar pengaruh ekonomi dan mewujudkan citra yang baik di luar negeri, Jepang melakukan berbagai strategi baik dalam tatanan kebijakan luar negerinya maupun dalam kualitas diplomasi agar dapat mewujudkan kepentingan nasional Jepang dan bersahabat dengan negara-negara di seluruh dunia. Dalam perkembangannya pada tahun 1997, Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto memberikan pidatonya:



## Message from Prime Minister Hashimoto to the People of Republik Indonesia

### Masa Depan yang Penuh Harapan, Stabil, dan Menguntungkan untuk Semua

Yang Terhormat Rakyat Republik Indonesia,

Sungguh merupakan suatu kegembiraan besar dapat memulai Tahun Baru dengan mengunjungi negara anda yang sedang mempersiapkan peringatan ulang tahun ke-30 berdirinya Asosiasi Negara Negara Asia Tenggara.

Sejak berdirinya pada tahun 1967, ASEAN telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi di seluruh wilayah ini. Demikian juga Jepang telah berusaha ikut ambil bagian dalam perdamaian dan kemakmuran di Asia. Pada dasawarsa-dasawarsa terakhir ini, kerjasama dari hati ke hati dengan para negara tetangga telah menjadi suatu dasar yang membuat seluruh wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kelas dunia. Keberhasilan tanpa cela dari negara-negara ASEAN selama 30 tahun terakhir ini merupakan suatu sumber kegembiraan besar bagi saya dan seluruh rakyat Jepang.

Saya percaya bahwa tahun-tahun berikut akan memberi kami banyak kesempatan untuk bekerjasama lebih erat: sebagai sekutu untuk meningkatkan kerjasama regional, dan sebagai sahabat untuk menciptakan masa depan yang lebih penuh harapan, stabil, dan menguntungkan bagi seluruh wilayah ini. Bekerja bersama-sama, kita dapat membangun dunia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang dan sesudahnya. Saya menunggu dengan penuh kegembiraan saat kunjungan saya ke negara anda.

Ryutaro Hashimoto  
Prime Minister of  
Japan<sup>44</sup>

<sup>44</sup> <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/prmv9701/indonesia.html>

Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara mitra dan sahabat Jepang dalam mewujudkan kepentingan nasional Jepang. Bagi negara seperti Jepang yang sebagian besar tergantung pada perdagangan luar negeri untuk pembangunan ekonominya, diplomasi ekonomi dalam sistem baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat sangat menguntungkan bagi Jepang dalam mewujudkan kepentingan ekonominya.<sup>45</sup> Hal ini dikarenakan Jepang tidak perlu memikirkan masalah keamanan yang telah dijamin oleh Amerika Serikat dan Jepang dalam hal ini memfokuskan negaranya pada pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.<sup>46</sup>

Dengan demikian hal ini memungkinkan Jepang untuk meningkatkan volume perdagangan luar negerinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memikirkan efisiensi dalam setiap kegiatan ekonominya serta menempatkan perusahaan-perusahaan Jepang pada persaingan internasional untuk memperbesar pangsa pasarnya.<sup>47</sup> Dalam hal ini, aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan luar negeri Jepang antara lain: MOFA (*The Ministry of Foreign Affairs*), MITI (*The Ministry of International Trade and Agency*), MOF (*The Ministry of Finance*) dan EPA (*The Economic Planning Agency*). Dalam menjalankan diplomasinya, terdapat akar kebudayaan yang dimiliki oleh budaya diplomasi Jepang yaitu menggabungkan kultur *awase* dan *erabi*.<sup>48</sup>

Selain itu dalam pelaksanaannya sebagai negara yang dikenal dengan istilah *Japan Incorporated* (kuatnya dan kolaborasi antara pemerintah Jepang dengan pihak swasta Jepang dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Jepang) dalam diplomasinya nilai *nemawashi* (musyawarah seluruh elemen dari kepentingan nasional Jepang) juga diterapkan dalam diplomasi Jepang. Menurut pandangan *erabi* manusia dapat dengan bebas mengontrol lingkungannya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pandangan ini mengandung arti bahwa apabila seseorang menetapkan tujuannya, menyusun sebuah rencana, semua

---

<sup>45</sup> Yoshihara Kunio, *Japanese Economic Development* (London: Oxford University Press, 1986), hal. 19.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Mochtar Lubis, *Dasar Pikiran Kebudayaan Diplomasi Jepang: Kekuatan Yang Membisu dan Peranan Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor, 1981), hal 2.

terkait dengan tujuan rencana tersebut dan kemudian bertindak mengubah lingkungan tersebut sesuai dengan rencananya.

Hal ini mengandung suatu tatanan logis yang terdiri dari berbagai konsep dan yang kontra terhadap konsep dan sudah direncanakan sehingga pada saat menyusun suatu rencana maupun tindakan untuk mengubah lingkungan harus memperhitungkan keputusan yang terbaik dan menguntungkan sesuai dengan tujuan dan rencana tersebut. Dalam hal ini, *erabi* merupakan sebuah logika dan pilihan untuk berbuat dan memilih alternatif terbaik untuk mewujudkan sebuah kepentingan.<sup>49</sup>

Sedangkan *awase* dalam pengertiannya adalah menolak suatu gagasan bahwa manusia dapat mengontrol dan memanipulasi lingkungannya untuk sebuah kepentingan, sehingga sebagai gantinya dipikirkan langkah-langkah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada kenyataannya, terdapat berbagai perbenturan kepentingan serta batas – batas yang senantiasa berubah. Dalam hal ini *awase* merupakan sebuah langkah untuk dapat membaca situasi, kondisi, dan melihat berbagai peluang dalam berbagai perubahan yang ada serta diperlukannya sifat kompromistis dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada.<sup>50</sup> Dalam budaya *awase* seseorang tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya tetapi juga dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya mereka juga mengharapkan agar orang lain juga dapat menyesuaikan diri dengan mereka sehingga dapat meminimalisir berbagai konflik maupun pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pendekatan *awase* dapat dikatakan menetapkan bahwa perunding dapat siap untuk dapat saling menyesuaikan diri dengan posisi lawannya masing-masing. Bagi orang Jepang untuk menciptakan hubungan pribadi antar kedua belah pihak yang berunding adalah penting dan hal ini dilakukan agar dapat berbicara terbuka dalam suasana saling memberi dan menerima. Dalam hal ini *awase* merupakan sebuah sikap yang menghendaki kesediaan kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri (*awaseru*) dalam situasi yang tanpa syarat-syarat tertentu dan bebas dari prasangka yang tidak baik/prasangka buruk.

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

Pendekatan *awase* ini juga memperhitungkan sebuah perbedaan antara teori dengan suatu perubahan keadaan. *Awase* dalam melakukan kegiatan lebih banyak berada di belakang layar dibandingkan *erabi*, melalui perantara dan mengambil sebuah keputusan setelah mempertimbangkan berbagai macam pendapat maupun masukan yang ada, pertimbangan ini dapat mendorong tercapainya jalan keluar yang dapat menyelamatkan kehormatan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang berada dalam perundingan ini cenderung memisahkan dimensi formal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjadinya sebuah kesepakatan. Diplomasi yang dilakukan Jepang merupakan seni negosiasi negara Jepang dengan negara lain dalam rangka memelihara kepentingan nasionalnya demi mewujudkan tujuan nasional.<sup>51</sup>

Sesuai dengan inti dan prinsip dasar luar negeri Jepang yaitu meningkatkan peran Jepang yang lebih besar dalam pemeliharaan pengertian secara lebih mendalam dan bersahabat dengan seluruh bangsa di dunia dengan mengembangkan sikap saling pengertian antara bangsa Jepang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.<sup>52</sup> Adapun implementasi dari *awase* dan *erabi* ini adalah ketika Jepang menginginkan adanya *Asian Monetary Fund* tetapi keinginannya ditolak oleh pihak Amerika Serikat, dan Jepang menyesuaikan diri dengan berperan serta dengan berinisiatif memberikan bantuan Miyazawa Plan terhadap negara-negara Asia yang terkena krisis melalui bantuan bilateral maupun multilateral.

Jepang merupakan negara yang sebagian besar pembangunannya ekonominya tergantung pada perdagangan luar negeri untuk pembangunan ekonomi negaranya.<sup>53</sup> Perusahaan-perusahaan Jepang banyak beroperasi di banyak negara yang menghasilkan pendapatan serta keuntungan maupun arus balik modal yang cukup besar bagi Jepang.<sup>54</sup> Dalam memperkuat peran ekonomi dan citra baik di negara-negara yang menjadi mitra ekonomi Jepang, Jepang melakukan berbagai kerjasama, bantuan ekonomi, sosial, budaya dan kerjasama lainnya sesuai dengan isu dan perkembangan situasi negara yang bersangkutan dan situasi internasional.

<sup>51</sup> Hans J. Magenthu, *Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace 6th Edition* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hal. 296.

<sup>52</sup> Wakaba Shinjukuhu, *Jepang Dewasa Ini* (Jakarta: CSIS, 1989), hal. 29.

<sup>53</sup> Yoshihara Kunio Op Cit hal. 19.

<sup>54</sup> Ibid

Indonesia merupakan salah satu dari negara mitra Jepang dalam bidang ekonomi, dalam hal ini Indonesia juga mendapat berbagai bantuan serta kerjasama ekonomi. Dengan pertumbuhan ekspor dan juga bantuan ekonomi yang diberikan Jepang kepada berbagai negara di dunia, kedudukan Jepang dan citra Jepang dalam dunia internasional menjadi penting dan disegani pertumbuhannya oleh dunia internasional. Sebagai negara yang telah menjadi raksasa dalam bidang ekonomi, Jepang mempunyai kepentingan strategis regional maupun internasional yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kepentingan Jepang bertumpu dan berfokus pada bidang ekonomi.<sup>55</sup>

Ekonomi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari politik dan suatu negara besar tidak dapat mengasingkan diri dari komunitas politik dunia dan sistem internasional.<sup>56</sup> Ketika Jepang hendak memainkan peran yang lebih besar dan mandiri dalam bidang diplomasi politik di kawasan Asia dan dunia, banyak asumsi dasar yang digunakan Jepang dalam menetapkan suatu kebijakan politik dan ekonominya, namun kebijakan tersebut sudah tidak berlaku lagi seiring dengan perubahan hubungan Jepang dengan Amerika Serikat, akibat pertumbuhan ekspornya yang meningkat serta pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat tinggi dan terus berlanjut secara cepat.<sup>57</sup>

Dalam hal ini Jepang menyadari akan pengaruh yang sangat besar Amerika Serikat dalam dunia internasional. Oleh karena itu Jepang juga membuat strategi untuk memiliki pengaruh yang juga besar dalam dunia internasional dengan memberikan berbagai bantuan dan kerjasama dengan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Dengan kerjasama internasional Jepang dalam hal ini dituntut lebih giat dalam mewujudkan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran. Dalam hal ini, Jepang membentuk "*International Cooperative Initiative*" yang dibangun berdasarkan tiga tonggak yaitu bekerjasama untuk perdamaian, memperluas bantuan resmi pembangunan dan meningkatkan pertukaran budaya internasional.<sup>58</sup> Adapun bantuan dan kerjasama ekonomi

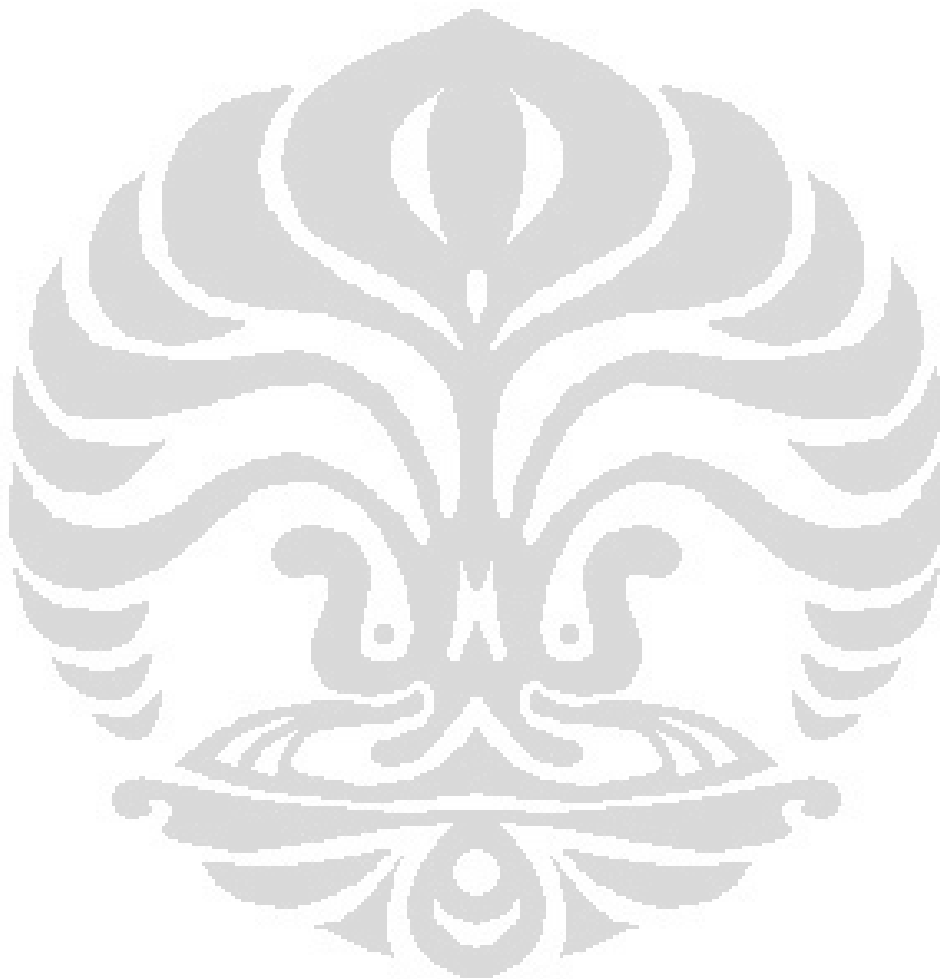
<sup>55</sup> Toru Yano, *The Pacific Basic Cooperation Concept: A Critical Japanese View Point*, dalam US Congress, Joint Economic Committee, Pacific Region Interdependencies, 97<sup>th</sup> Congress, 1<sup>st</sup> Session, 1981.

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Wakaba Shinjukuhu, Op Cit.

Jepang tersebut antara lain: hibah, pinjaman, bantuan operasional teknis serta berbagai kerjasama dalam berbagai bidang baik sosial, kesehatan, budaya maupun isu-isu yang berkembang dalam dunia internasional.



### **BAB III**

#### **KRISIS ASIA TAHUN 1997- 2000**

Krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 merupakan sebuah peristiwa dimana pada saat itu terjadi sebuah fenomena ekonomi yang mengakibatkan gejolak perekonomian di negara-negara Asia. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, Indonesia dan krisis Asia serta Jepang dan krisis Asia.

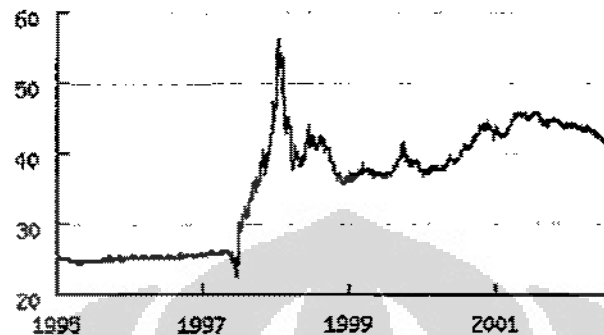
#### **III.1 Krisis Asia tahun 1997-tahun 2000**

Krisis finansial Asia adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter di Indonesia. Krisis Asia merupakan suatu fenomena krisis ekonomi yang pada mulanya melanda Thailand dan pengaruhnya menyebar hingga ke kawasan Asia Tenggara dan juga pada perekonomian dunia. Hal ini berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand Baht terhadap Dollar Amerika Serikat. Selama itu mata uang Baht dan Dollar Amerika Serikat dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari Baht ini menimbulkan tekanan terhadap mata uang negara ASEAN dan menyebar secara regional. Adanya keterkaitan global dalam perdagangan dunia membuat krisis Asia juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian dunia.

Sampai dengan tahun 1996, Asia menarik hampir setengah dari aliran modal negara berkembang. Mata uang Thailand dan Indonesia berhubungan erat dengan Dollar, yang naik nilainya pada tahun 1990-an. Krisis Asia dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan mempengaruhi mata uang, pasar bursa dan harga aset ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari kejadian di Amerika Selatan, investor barat kehilangan kepercayaan dalam keamanan di Asia Timur dan memulai menarik uangnya, sehingga menimbulkan efek bola salju.



**Tabel III.1**  
**Pertukaran uang Baht-dollar**



2004 Federal Reserve Bank of St. Louis  
research.stlouisfed.org

Dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1995, ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada tanggal 14 Mei dan 15 Mei 1997, mata uang Baht, terpukul oleh serangan spekulasi besar. Pada tanggal 30 Juni, Perdana Menteri Chavalit Yonchaiyudh berkata bahwa dia tidak akan mendevaluasi Baht, tetapi administrasi Thailand akhirnya mengambangkan mata uang lokal tersebut pada tanggal 2 Juli 1997. Pada tahun 1996, "dana hedge Amerika telah menjual US\$ 400 juta mata uang Thai. Dari tahun 1985 sampai dengan tanggal 2 Juli 1997, Baht dipatok pada 25 kepada dollar. Baht jatuh tajam dan hilang setengah harganya. Baht jatuh ke titik terendah di 56 kepada dollar pada bulan Januari 1998. Pasar saham Thailand jatuh 75% pada tahun 1997. Finance One, perusahaan keuangan Thailand terbesar bangkrut. Pada tanggal 11 Agustus 1997, IMF (*International Monetary Fund*) membuka paket penyelamatan dengan lebih dari 16 milyar dollar AS (kira-kira 160 trilyun Rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 1997 IMF menyetujui, paket "bailout" sebesar 3,9 milyar dollar Amerika Serikat kepada Thailand. Dalam hal ini berbagai kalangan berpendapat mengenai krisis yang melanda Asia dan mengatakan bahwa krisis Asia terjadi dikarenakan akibat dari kelalaian para pengelola negara, keserakahan pihak swasta dalam mengejar keuntungan sehingga memanfaatkan uangnya pada sektor yang tidak produktif, dan tidak terkontrolnya hutang negara maupun swasta.

**Tabel III. 2**  
**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara ASEAN**  
**Periode tahun 1996-1999**  
**(Persen per tahun)**

Negara	1996	1997	1998	1999
Indonesia	7,8	4,7	-13,2	0,2
Thailand	5,9	-1,7	-10,2	4,2
Malaysia	10,0	7,5	-7,5	5,4
Filiphina	5,8	5,2	-0,5	3,2

**Sumber:** Asian Development Outlook 2000, Bank Pembangunan Asia.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa krisis Asia memberikan dampak yang cukup signifikan secara regional, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara ASEAN dan Indonesia merupakan negara yang paling rendah pertumbuhannya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pada kenyataannya krisis yang mempengaruhi Asia sebenarnya terkait masalah fundamental didalam struktur ekonomi masing-masing negara. Pinjaman yang berlebihan dari luar negeri merupakan salah satu penyebab dari krisis Asia.<sup>59</sup>

### III.2 Indonesia dan Krisis Asia

Krisis moneter Indonesia berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli tahun 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand baht terhadap dollar Amerika Serikat. Selama itu mata uang baht dan dollar Amerika Serikat dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari baht ini menimbulkan tekanan terhadap mata uang negara-negara ASEAN dan menyebar secara regional. Indonesia, yang mengikuti sistem mengambang terkendali, pada awalnya bertahan dengan memperluas pengendalian/ intervensi, namun di bulan Agustus tahun 1997 Indonesia terpaksa melepaskan pengendalian/ intervensi tersebut dan rupiah langsung terdevaluasi.

Dalam bulan September/ Oktober tahun 1997, rupiah telah terdevaluasi 30% sejak bulan Juli tahun 1997. Di bulan Juli tahun 1998 dalam setahun, rupiah sudah terdevaluasi sekitar 90%, diikuti oleh kemerosotan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di pasar modal Jakarta dengan jumlah sekitar 90% dalam

<sup>59</sup> Ibid.

periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia paling lama mengalami depresi ekonomi.<sup>60</sup>

Kekhawatiran para investor asing dan domestik serta kreditor asing memuncak dan menjadi panik sehingga mereka berbondong-bondong menjual saham-saham mereka dalam perusahaan-perusahaan publik. Penghasilan dalam rupiah dari penjualan saham-saham kemudian ditukar dengan dollar Amerika Serikat. Tekanan terhadap rupiah semakin besar sewaktu perusahaan-perusahaan Indonesia yang banyak berhutang pada kreditor asing juga bergegas melunasi hutang-hutang mereka.<sup>61</sup> Suatu faktor penting yang mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia adalah beban pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Pada akhir tahun 1995 jumlah hutang luar negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) mencapai US\$ 100 milyar dan meningkat US\$ 20 milyar menjadi US\$120 miliar pada akhir tahun 1997.<sup>62</sup> Dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak hanya memberikan dampak pada bidang ekonomi saja, tetapi juga memberikan dampak pada bidang sosial, politik hingga pada tatanan ideologi masyarakat. Rezim Orde Baru dengan Soeharto sebagai presidennya setelah 32 tahun berkuasa pada tanggal 28 Mei 1998 berakhir dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Turunnya Soeharto tersebut sebagai akibat dari gerakan mahasiswa yang menuntut agar presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tuntutan mahasiswa muncul karena kekecewaan rakyat terhadap kekuasaan orde baru saat itu yang sentralistik dan otoriter. Kekecewaan tersebut bertambah dengan adanya krisis Asia/ krisis moneter yang menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami kemerosotan. Mata uang rupiah melemah dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/ dollar Amerika Serikat pada tanggal 22 Januari 1998.<sup>63</sup> Dengan menurunnya nilai tukar rupiah tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan ekonomi dari rakyat kecil hingga pengusaha maupun konglomerat. Dari krisis yang terjadi tersebut dapat kita lihat bahwa penyaluran modal secara besar-besaran dengan resiko terjadinya penarikan modal secara tiba-

<sup>60</sup> <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8533-krisis-moneter-indonesia/>

<sup>61</sup> Mahmud Thoha, *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hal.66.

<sup>62</sup> Jeffrey A. Winters, *Dosa-Dosa Politik Orde Baru* (Jakarta:Djambatan, 1999), hal. 123.

<sup>63</sup> Krisis Ekonomi 1998 Tragedi Tak Terlupakan, Kompas Senin, 21 Desember 1998.

tiba yang menyebabkan arus aliran modal yang tidak terkendali serta adanya permintaan dollar Amerika Serikat yang semakin meningkat dan kekhawatiran negara dengan adanya cadangan devisa yang digunakan untuk membeli dollar Amerika Serikat, dalam hal ini menurut Mohamad Sadli tidak terlihat adanya pengawasan tegas dan tepat dari bank sentral (Bank Indonesia) khususnya dalam pemberian pinjaman.<sup>64</sup> Hal ini juga dapat terlihat dari adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kredit macetnya mencapai triliunan rupiah sehingga menyebabkan penutupan 16 bank bermasalah pada tanggal 1 November 1997 yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank.<sup>65</sup>

Ada tiga gelombang yang menimpa bangsa Indonesia sebagai akibat dari krisis ekonomi atau krisis moneter tersebut. Gelombang pertama adalah menimpa kalangan pengusaha besar atau konglomerat dan kalangan perbankan. Akibat nilai rupiah yang anjlok para pengusaha tersebut kesulitan membayar utang luar negeri hingga terjadinya likuidasi terhadap enam belas bank swasta yang dilakukan pemerintah saat itu. Gelombang kedua menimpa kelas menengah di perkotaan. Indikasi dari hal ini terlihat dari semakin sulitnya pencapaian target keuntungan bisnis, ketatnya komponen usaha, naiknya harga barang-barang berkomponen tinggi di pasar swalayan serta turunnya penghasilan.

Terjadinya gelombang kedua ini terlihat ketika terjadi pembelian besar-besaran sembilan bahan pokok serta barang kebutuhan lainnya oleh kalangan kelas menengah di pasar-pasar swalayan di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya. Sedangkan gelombang ketiga merupakan gelombang yang dialami oleh kalangan rakyat menengah ke bawah. Hal ini terjadi ketika penyedia dan tingkat harga berbagai kebutuhan pokok terutama sembilan bahan pokok melambung tinggi ditambah dengan barang-barang yang mulai langka serta terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran di beberapa perusahaan swasta di Indonesia.<sup>66</sup> Krisis Asia juga mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita Indonesia. Pada tahun 1996, pendapatan perkapita Indonesia mencapai US\$ 1200, sedangkan pada tahun

<sup>64</sup> H.W. Arndt & Halhill, *South East Asia's Economic Crisis: Indonesian Crisis* (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 1999), hal. 23.

<sup>65</sup> Sukowaluyo Mintohardjo, *BLBI Simalakama: Pertaruban Kekuasaan Presiden Soeharto* (Jakarta: Riset Ekonomi Sosial Indonesia, 2001), hal. 39.

<sup>66</sup> Lili Romli, *Mengggugat Partai Politik* (Depok: LIP FISIP UI, 2003), hal. 126.

1997 nilai tersebut turun menjadi US\$ 1.083. Pada tahun 1998, pendapatan perkapita Indonesia turun tajam menjadi hanya US\$ 465.<sup>67</sup> Adanya peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia semakin menambah lesunya pasar Indonesia.

Lesunya pasar Indonesia mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pasar Indonesia mengalami penurunan penjualan dan kegiatan produksi yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini berdampak pada adanya pengurangan jam kerja, bahkan penjualan aset dan penghentian kegiatan di berbagai perusahaan.<sup>68</sup> Pengurangan jumlah tenaga kerja dan penghentian kegiatan di berbagai perusahaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 1996, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta jiwa, pada tahun 1997 meningkat menjadi 11,5 juta jiwa dan jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 1998 hingga mencapai 20 juta jiwa.<sup>69</sup>

Penurunan pendapatan perkapita dan kenaikan jumlah pengangguran mendorong terjadinya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 22,5 juta jiwa, dan hingga tahun 1998 jumlah tersebut meningkat menjadi 114 juta jiwa.<sup>70</sup> Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia semakin menambah lesunya pasar Indonesia. Lesunya pasar Indonesia juga berdampak pada menurunnya kegiatan perdagangan Indonesia. Indonesia setelah masa orde baru terjadi sebuah liberalisasi politik. Dalam hal ini liberalisasi merupakan proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga. Pada tingkat individu perlindungan itu meliputi hak diperiksa di pengadilan, kebebasan untuk mengadakan gerakan, hak berbicara dan mengeluarkan petisi. Sedang pada tingkat kelompok meliputi hak untuk bebas

<sup>67</sup> Masami Ishida, *Economic Crisis in Indonesia* (Tokyo: JETRO, 2000), hal. 28.

<sup>68</sup> Edy Lee, *The debate on The Causes of The Asian Crisis: Crony Capitalism Versus International System Failure*, dalam *International Politics and society*, No. 2 (1999), hal. 158.

<sup>69</sup> Ippei Yamazawa, *Strengthening Cooperation Among Asian Economies in Crisis* (Tokyo: JETRO, 1999), hal. 101.

<sup>70</sup> Faisal H. Basri, *Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi: Implikasinya Bagi Kerjasama Di Asia Pasifik*, Dalam *Analisis CSIS*, Vol. XXXVIII, no 1, 1999, hal. 38.

dari hukuman yang dijatuhkan karena mengekspresikan ketidaksepakatan secara kolektif terhadap kebijakan pemerintah, bebas dari sensor terhadap berbagai cara berkomunikasi, kebebasan membentuk kelompok secara sukarela dan lain-lain.

Terjadinya liberalisasi politik tersebut ditandai adanya redefinisi hak-hak politik rakyat dimana setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun terkekang oleh rezim otoriter Soeharto. Dengan adanya tuntutan tersebut yang terjadi kemudian adalah luapan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan membentuk organisasi. Di kalangan masyarakat juga dalam kerangka kebebasan terjadi berbagai tuntutan-tuntutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Fenomena tuntutan pengembalian tanah yang dulu dikuasai oleh negara atau perkebunan milik negara merupakan salah satu contohnya.

Pada tataran massa akar rumput terjadi ledakan partisipasi politik, huru-hara, kekerasan massa, amuk massa hingga penjarahan kolektif. Sementara dikalangan mahasiswa terjadi demonstrasi dan protes dimana-mana. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Jika dimasa lalu partai politik hanya ada tiga yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan pada masa era setelah orde baru partai politik yang ada mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut 148 partai mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari jumlah tersebut setelah melalui seleksi yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu tahun 1999 hanya 48 partai politik.<sup>71</sup>

Di lain pihak terdapat analisa yang mengatakan Indonesia sebagai Jamrud katulistiwa yang memiliki banyak kekayaan alam merupakan lahan potensial bagi para aktor internasional yang berkepentingan untuk mencari dan mengambil berbagai keuntungan, sebagai contoh adanya penentangan terhadap pencalonan kembali BJ Habibie sebagai presiden kembali pada tahun 1999 (yang pada akhirnya terpilih pada tahun 1999 adalah Abdurrahman Wahid) merupakan salah satu dari sekian banyak peran aktor internasional dan dalam negeri yang berkepentingan di Indonesia. Dengan memberikan kesan dan suatu pencitraan

---

<sup>71</sup> Ibid hal. 133.

bahwa Habibie adalah seorang Islam Fundamentalis, ekstrimis, banyak terjadi penentangan terhadap pencalonan kembali Habibie sebagai presiden, hal ini sesuai dengan paradigma benturan peradaban oleh Samuel Huntington mengenai bentrokan peradaban.

Dilihat dari segi sejarahnya Habibie memang sedang giat membangun industri-industri teknologi tinggi yang merupakan hasil dari karya negeri sendiri. Dalam hal ini pihak asing merasa tidak nyaman akan adanya potensi persaingan yang akan muncul dikemudian hari. Habibie juga dicitrakan oleh pihak media internasional yang berkepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat internasional maupun berbagai pihak yang memusuhi Habibie baik karena orientasi agamanya maupun berbagai hal lain yang memang berpotensi mengancam kepentingan asing di Indonesia. Dalam hal ini IMF (*Internasional Monetary Fund*) dan bank dunia yang didominasi Amerika Serikat memanfaatkan bantuan keuangan mereka dan membuat tekanan terhadap Habibie sehingga apa yang diinginkan oleh pihak asing tersebut tercapai (salah satu contoh ditutupnya IPTN: Industri Pesawat Terbang Nasional).<sup>72</sup>

### III.3 Jepang dan Krisis Asia

Pada tahun 1990-an Jepang mengalami kemunduran ekonomi. Indeks Saham Gabungan Nikkei yang menurun dan tingginya nilai tukar yen terhadap dollar Amerika Serikat (*yendaka*) merupakan salah satu indikator mengenai kemunduran ekonomi Jepang. Tingginya nilai tukar yen terhadap dollar Amerika Serikat mengakibatkan melemahnya daya saing produk Jepang di pasaran internasional. Pada sisi lain, penguatan yen dapat menguntungkan masyarakat Jepang karena daya beli mereka dapat meningkat namun dalam hal ini penguatan yen tidak sepenuhnya menguntungkan Jepang karena tidak seluruh produksi Jepang menggunakan mata uang yen.<sup>73</sup> Penguatan nilai tukar Yen tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat pada saat itu yang merupakan hasil dari perjanjian *plaza Accord* (tahun 1985), perjanjian ini dilakukan ketika Amerika berusaha untuk membatasi impor dari Jepang kepada negara-negara tertentu dan

<sup>72</sup> Bilver Singh, *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hal 144.

<sup>73</sup> Lonjakan Yen Justru Menyakitkan Jepang, Suara Karya, 26 Februari 1993.

mengenakan pajak tambahan bagi produk-produk Jepang yang masuk ke Amerika Serikat seperti: otomotif, baja maupun elektronik.

Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada tahun 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada bulan Desember 1989 dan musim gugur 1990. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham.<sup>74</sup> Hal ini menyebabkan banyak dunia usaha yang melakukan pinjaman terhadap bank akhirnya tidak dapat melunasi kewajibannya dan kemudian menjadi kredit macet atau *bad loan*.<sup>75</sup> Sektor industri properti dan perbankan di Jepang merupakan sektor yang cukup memberi pengaruh terhadap kemunduran ekonomi di Jepang. Hal ini terjadi ketika nilai properti dan transaksi rumah real estate di Jepang menurun.

Hanya dalam kurun waktu satu tahun saja yaitu pada bulan Juli 1991 sampai dengan bulan Juli 1992 harga tanah menurun: Tokyo turun 15,2%, Osaka 23,8%, dan Kyoto 27,5%.<sup>76</sup> Salah satu yang menyebabkan masalah tersebut adalah para pemilik tanah menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan kepada bank untuk memperoleh kredit kemudian uang yang sudah didapat digunakan untuk bermain dalam pasar modal, dan berputar terus menerus serta cenderung spekulatif.<sup>77</sup>

Nilai-nilai aset dalam bentuk saham dan properti meningkat namun tidak normal karena tidak seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini disebut inflasi harga aset/ inflasi harga saham. Situasi ini dicirikan oleh peningkatan yang kuat dalam harga-harga aset sementara harga-harga komoditas dan jasa secara

<sup>74</sup> <http://dedeknanik.blogspot.com/2009/03/perekonomian-jepang.html>.

<sup>75</sup> Pemerintah Jepang Desak Bank Ungkap Bad Loan, *Bisnis Indonesia*, 26 November 1993.

<sup>76</sup> Lim hua Sing, *Peran Jepang Di Asia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 79.

<sup>77</sup> D. Simarmata, *Spekulasi Tanah dan Pasar Modal Berdampak Crash*, *Suara Karya* 18 November 1991.



umum tidak terjadi peningkatan. Meningkatnya harga tanah tersebut tidak mencerminkan realitas perekonomian yang ada di Jepang.<sup>78</sup> Dari kejadian tersebut menciptakan *ekonomi gelembung/ bubble economy*, laju pertumbuhan ekonomi menurun namun harga-harga properti terus naik sehingga ada anggapan bahwa pada masa tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi padahal yang terjadi adalah sebaliknya dan ketika harga tanah dan saham menurun maka terjadilah ekonomi gelembung tersebut.

*Bubble Economy* Jepang terjadi karena adanya anggapan pada masyarakat Jepang lebih baik membeli saham dan membeli tanah daripada bekerja dengan tujuan untuk dijual kembali dengan keuntungan yang berlipat ganda. Antara tahun 1980-an sampai dengan 1990-an banyak terdapat perusahaan real estate di Jepang berdiri yang berasal dari pinjaman bank. Banyak pemilik properti yang melakukan pinjaman dengan jaminan properti tersebut. Ketika sektor properti tidak lagi produktif, terjadi kerugian terhadap para pemilik properti dan membuat mereka tidak mampu lagi membayar kembali pinjaman yang didapat dari bank. Ketika ekonomi gelembung ini pecah banyak perusahaan real estate yang menyatakan pailit. Pada bulan Desember 1991 terdapat 90 perusahaan real estate yang bangkrut dan merupakan jumlah tertinggi selama 15 tahun terakhir menurut Lembaga riset Shoko sebuah lembaga riset penelitian swasta di Tokyo.<sup>79</sup>

Dalam hal ini, beberapa kalangan dari para ekonom dunia menyatakan bahwa buruknya bisnis perbankan di Jepang diakibatkan kesalahan dari pihak perbankan sendiri karena bank memberikan pinjaman dana pada perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan *cash flow* (aliran dana yang keluar dan masuk pada suatu perusahaan) yang buruk.<sup>80</sup> Ketika properti sudah merosot dan tidak produktif lagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjaman dana tersebut tidak dapat mengembalikan dana milik bank dan berakibat bank tidak dapat menyalurkan dana-dana yang seharusnya disalurkan pada sektor-sektor ekonomi lain yang lebih produktif dan menguntungkan pada waktu jatuh tempo dan hal ini merupakan salah satu penyebab terganggunya pertumbuhan ekonomi Jepang pada saat itu. Penurunan sektor industri dan properti mengakibatkan sektor perbankan

<sup>78</sup> Noguchi Yukio, *Bubble Economics* (Tokyo: Nihon Keizai Shinbun, 1993), hal. 21.

<sup>79</sup> Perekonomian Gelembung Sabun pun Meletuslah, Suara Karya, 3 Mei 1991.

<sup>80</sup> Runtuhnya Sektor Properti, KOMPAS 23 November 1998.

Jepang mengalami kerugian karena banyaknya bank-bank Jepang mengalami kebangkrutan.<sup>81</sup>

Pada bulan November 1996 Ryutaro Hashimoto kembali terpilih untuk yang kedua kalinya.<sup>82</sup> Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto menjalankan kebijakan yang sudah dicanangkan sebelumnya yaitu reformasi administrasi, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan, struktur ekonomi, sistem finansial dan pendidikan.<sup>83</sup> Pada bulan April 1998 Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto melakukan reformasi keuangan secara menyeluruh yang populer disebut *Big Bang*. Reformasi tersebut antara lain terdiri dari reformasi perbankan khususnya pada prioritas peningkatan kualitas operasional bank dan tambahan hak otonomi untuk bank sentral untuk menciptakan sistem yang lebih bebas, adil dan global.<sup>84</sup>

Jepang merupakan negara yang sebagian besar pembangunan ekonominya tergantung pada perdagangan luar negeri untuk pembangunan ekonomi negaranya.<sup>85</sup> Selain itu, peran dari pemerintah Jepang juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Jepang. Bagi Jepang, negara adalah suatu keluarga besar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan, hal inilah yang melandasi hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Pemerintah dan kalangan swasta (perusahaan) memiliki tujuan yang sama oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh kedua belah pihak. Hal ini juga merupakan suatu pengertian yang jelas mengenai tugas dan fungsi masing-masing antara pemerintah dan perusahaan. Dari kedua hal tersebut, memungkinkan suatu kerjasama yang efektif antara pemerintah dan perusahaan.<sup>86</sup> Dalam hal ini pula sektor perbankan Jepang juga turut berperan didalamnya. Dalam budaya politik Jepang keterkaitan dan kolaborasi antara birokrat, politisi dan pengusaha disebut "*Segitiga Besi/ The Iron Triangle*."<sup>87</sup>

<sup>81</sup> Diperlukan dua dasawarsa Bagi bank Jepang Untuk Pulih Dari Bad Loan, *Bisnis Indonesia* 4 April 1997.

<sup>82</sup> [http://www.mofa.go.jp/POLICY/economy/apec/1997/rh\\_profile.html](http://www.mofa.go.jp/POLICY/economy/apec/1997/rh_profile.html)

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> <http://bric.berkeley.edu/research/forum/fukukawa.html>

<sup>85</sup> Yoshihara Kunio *Op Cit* hal. 19.

<sup>86</sup> Gene Gregory, *Hubungan Manusia Dalam Perusahaan Jepang*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1982), hal. 51.

<sup>87</sup> Happy Bone Zulkarnaen, *Kasus Hosokawa dan Etika Politik Jepang*, *Merdeka* 6 Mei 1994.

Jepang merupakan negara yang minim akan bahan mentah, ketiadaan bahan mentah untuk menghidupi industrinya menyebabkan Jepang harus mencari dan bergantung akan ketersediaan bahan-bahan mentah atau sumber daya alam dari negara-negara lain. Dengan demikian ketersediaan bahan mentah dan hasil industri Jepang merupakan suatu faktor yang sangat menentukan dalam perekonomian Jepang. Jepang sering disimbolkan sebagai negara yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam dan pasokan energi bagi keperluan industri dan perekonomiannya.<sup>88</sup> Kemajuan ekonomi yang dimiliki Jepang hingga saat ini merupakan bukti eksistensi kemampuan ekonomi Jepang di mata dunia internasional dan diakui sebagai salah satu negara industri terbesar di dunia, akan tetapi peningkatan ekspor yang sangat cepat serta pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat membuat banyak negara terutama Amerika Serikat menjadi cenderung melakukan proteksi terhadap berbagai barang-barang yang berasal dari Jepang untuk melindungi pasar domestiknya. Dalam hal ini Indonesia merupakan mitra Jepang yang dapat dikatakan cukup baik di mata Jepang dikarenakan minimnya proteksi terhadap berbagai produk yang berasal dari Jepang.

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 merupakan faktor yang memiliki pengaruh cukup penting bagi ekonomi Jepang. Krisis ekonomi Asia pertama kali di alami oleh Thailand kemudian krisis ini menyebar kebeberapa negara di kawasan Asia Tenggara antara lain Malaysia, Filipina dan Indonesia. Krisis yang melanda Asia membuat ekspor Jepang menurun karena negara-negara Asia merupakan pemakai terbesar barang-barang ekspor Jepang terutama produk-produk elektronik dan otomotif.<sup>89</sup> Selain itu Jepang juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan kawasan Asia tidak hanya dilihat dari segi geografis tetapi juga secara ekonomi, sosial, budaya dan historis. Oleh karena itu dalam setiap kebijakan maupun perkembangannya Jepang juga mencermati keadaan yang terjadi di kawasan Asia.

Krisis Asia memberikan dampak bagi perekonomian Jepang, banyak perusahaan Jepang yang mengandalkan impor bahan baku dari negara-negara

---

<sup>88</sup> Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 27.

<sup>89</sup> [www.findarticle.com](http://www.findarticle.com), *Perekonomian Jepang Bergantung Pada Ekspor*.

Asia Tenggara dan mengutamakan keuntungan penjualan dari pasar domestik mengalami penurunan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Japan Bank For International Cooperation (JBIC)* investasi langsung yang dilakukan Jepang sebagian besar (63%) ditujukan pada proyek-proyek yang berorientasi pada pasar Indonesia.<sup>90</sup> Selain itu beberapa bank di Jepang juga mengalami kerugian akibat dari jumlah pinjaman sebesar US \$ 23,14 miliar kepada sektor usaha di Indonesia yang mengalami kredit macet.<sup>91</sup> Selain itu perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang juga terkena dampak yang cukup signifikan, sebanyak 239 perusahaan dari 365 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia mengalami kerugian. Hal ini diakibatkan jatuhnya jumlah penjualan dikarenakan menurunnya tingkat permintaan dan peningkatan biaya operasional dalam biaya yang harus dikeluarkan untuk impor bahan baku dan pendanaan operasional.<sup>92</sup> Bangkrutnya salah satu lembaga keuangan terbesar di Jepang Yamaichi Securities memberikan efek domino.<sup>93</sup> Salah satunya adalah terjadi peningkatan tingkat pengangguran di Jepang pada tahun 1997 sebesar 3,3% menjadi 3,9% pada awal tahun 1998.<sup>94</sup> Selain itu tingkat kepercayaan rakyat Jepang terhadap pemerintah juga menurun seperti yang dikatakan dalam sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh *Yoshiuri Shinbun* bahwa sebanyak 32% warga Jepang tidak percaya lagi kepada pemerintah dan partai politik di Jepang.<sup>95</sup>

Bisa dikatakan ekonomi Jepang tergantung dengan ekonomi yang terjadi di Asia. Dengan modal yang ditanamkan Jepang di pasar Indonesia dapat membawa perekonomian kedua negara meningkat ke arah yang lebih baik lagi selain itu masyarakat Indonesia yang juga banyak mengkonsumsi produk-produk buatan Jepang juga merupakan salah satu faktor bagi pertumbuhan dan keuntungan ekonomi Jepang. Seandainya Indonesia mengalami kegagalan dalam proses pemulihan ekonominya maka kegagalan ekonomi yang dialami Indonesia juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Jepang. Sebaliknya jika terjadi

<sup>90</sup> JBIC Review no.1 (Tokyo: JBIC, 2000), hal. 22.

<sup>91</sup> Dominic Kelly, *Japan and The Reconstruction of East Asia* (New York: Palgrave, 2002), hal. 97.

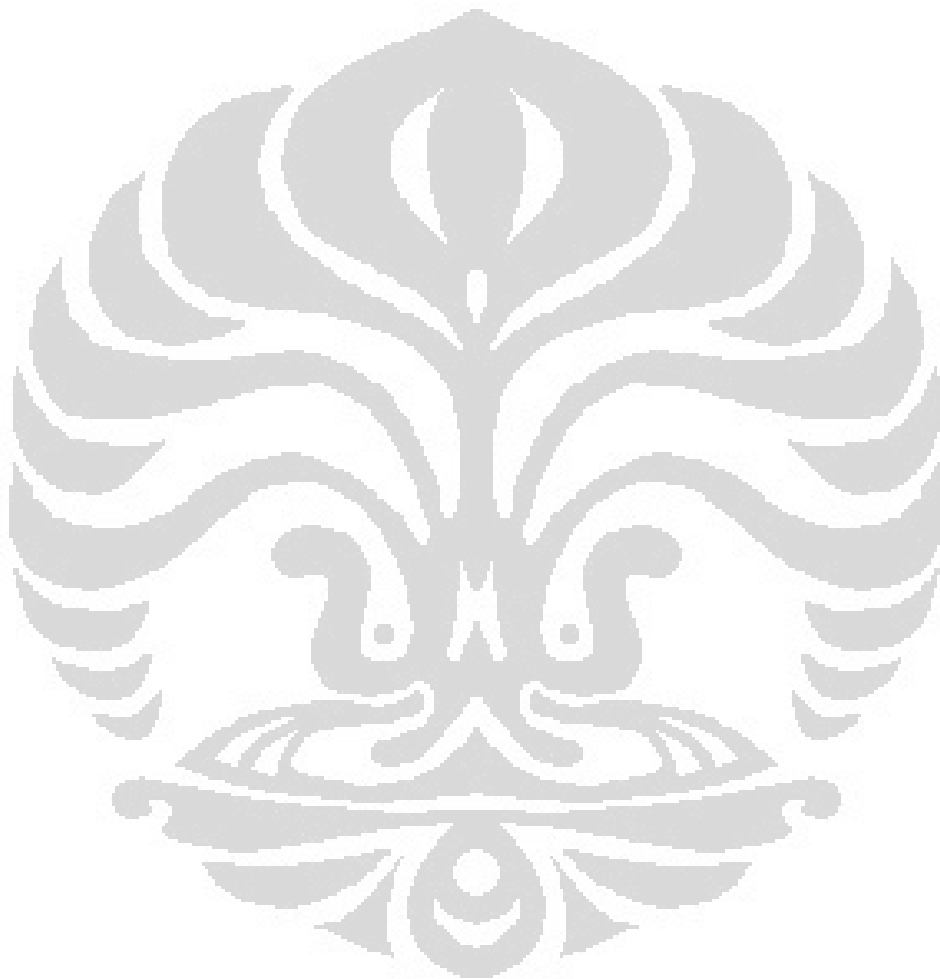
<sup>92</sup> Asian Currency Crisis and Its Effects on World Trade dalam JETRO White Paper on International Trade (Tokyo: JETRO, 1998), hal. 12.

<sup>93</sup> 11 Petinggi Yamaichi Terjerat Skandal keuangan, KOMPAS 12 Agustus 1997.

<sup>94</sup> Laporan Tahunan Jepang 1997/1998 (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Indonesia, 1998), hal. 25.

<sup>95</sup> Rakyat Jepang Tidak Mempercayai Parpol, KOMPAS 1 Mei 1998.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia akan memberikan keuntungan ekonomi juga bagi Jepang. Oleh karena itu, dengan adanya Indonesia yang makmur akan memberi dampak positif bagi Jepang dimana selama ini Jepang merupakan negara yang memiliki peran dalam perekonomian Indonesia.



**BAB IV**  
**KEPENTINGAN JEPANG DALAM BANTUAN EKONOMI TERHADAP**  
**INDONESIA DI MASA KRISIS ASIA**  
**TAHUN 1997 - TAHUN 2000**

Jepang merupakan negara yang sebagian besar pembangunan ekonominya tergantung pada perdagangan luar negeri untuk pembangunan ekonomi negaranya. Dengan demikian perekonomian Jepang juga tergantung pada kestabilan perekonomian yang ada di kawasan Asia dalam hal ini Indonesia. Adanya krisis yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia juga mempengaruhi perekonomian Jepang. Dalam hal ini Jepang mencermati keadaan yang terjadi di Indonesia untuk memulihkan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai bantuan dan kerjasama terhadap Indonesia. Bagaimana bentuk bantuan dan kerjasama Jepang terhadap Indonesia dan kepentingan ekonomi maupun keamanan Jepang terhadap Indonesia akan dibahas dalam bab ini.

#### **IV.1 Bantuan Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia**

Adanya krisis yang melanda Indonesia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang. Dalam hal ini Jepang melakukan antisipasi, strategi dan berusaha untuk memulihkan perekonomian Indonesia dengan berbagai bantuan dan kerjasama yang dilakukannya. Bantuan ODA (Official Development Assistance), merupakan bantuan resmi pemerintah Jepang yang merupakan bantuan resmi yang didalamnya terdapat unsur hibah lebih dari 25% dengan peruntukkan pembangunan ekonomi Indonesia. Bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia melalui dua jalur yaitu :

A.) Melalui jalur bilateral: bantuan yang diberikan secara langsung dari pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia melalui organisasi pemerintah Jepang yang ada di Indonesia seperti *JICA*, *JBIC*, dan lain sebagainya.

Beberapa organisasi yang berkaitan dengan *ODA* antara lain:

(A.1) *Japan International Cooperation Agency (JICA)*

Sebuah badan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari pemerintah Jepang dalam memberikan berbagai bantuan program bilateral. JICA merupakan induk organisasi dari berbagai organisasi lain yang menangani bantuan bilateral Jepang.<sup>96</sup>

(A.2) *Development Assistance Committee (DAC)*

Komite bantuan pembangunan untuk solusi dan negosiasi mengenai peningkatan dan penurunan bantuan antara negara penerima donor dengan pemberi donor yang terkait dengan kebutuhan, isu dan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>97</sup>

(A.3) *Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)*

Organisasi yang memberikan pinjaman bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.<sup>98</sup>

(A.4) *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*

Institusi yang memberikan bantuan berupa yen Jepang yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan merupakan gabungan dari *The Japan Export Import* dengan *The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)*. Tujuan utama *JBIC* adalah menstabilkan keadaan pertumbuhan ekonomi negara Jepang dan mempererat hubungan ekonomi Jepang dengan negara-negara lainnya di dunia. Secara khusus, Undang-Undang *JBIC* mengharuskan adanya jaminan kepastian dalam pengembalian pinjaman ("kepastian pembayaran kembali"). Menurut UU ini, pengeluaran juga tidak boleh melampaui pendapatan ("pendapatan harus cukup untuk menutup pengeluaran").<sup>99</sup>

B.) Melalui jalur multilateral: bantuan yang diberikan pemerintah Jepang bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti *IMF*, *ADB*, dan lain sebagainya. Dalam bantuan yang diberikan Jepang terdapat tiga jenis kategori yaitu: pinjaman, hibah dan bantuan teknis.

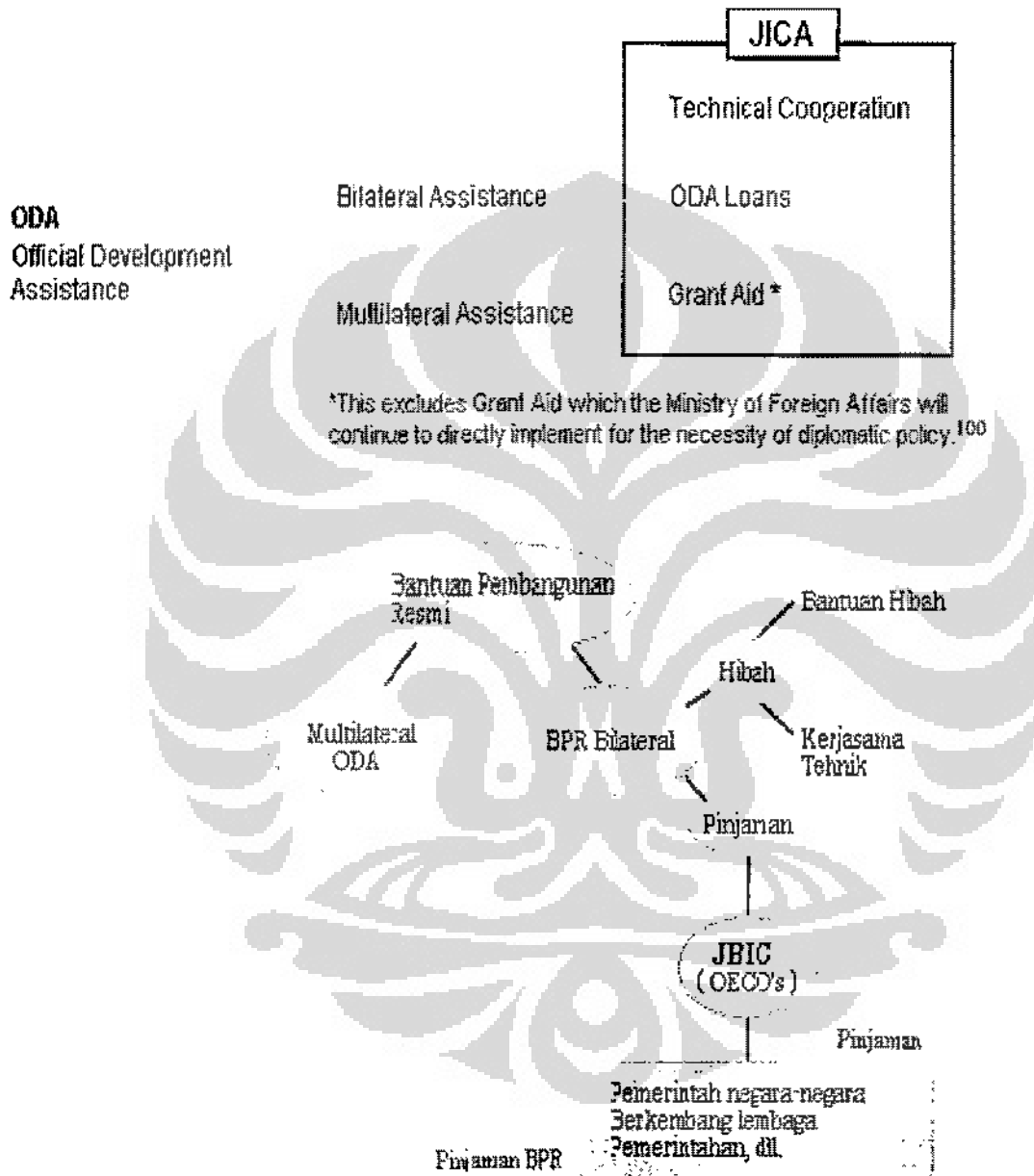
<sup>96</sup> <http://www.jica.go.jp/english/>

<sup>97</sup> <http://www.oecd.org/dac/>

<sup>98</sup> [http://www.jbic.or.id/id/profile\\_2.php](http://www.jbic.or.id/id/profile_2.php)

<sup>99</sup> [http://www.jbic.or.id/id/profile\\_2.php](http://www.jbic.or.id/id/profile_2.php)

**Tabel IV. 1**  
**Penyaluran ODA**



<sup>100</sup> <http://www.jica.go.jp/english/about/oda/>



**Tabel IV. 2**  
**Nilai Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia**  
**(Dalam US\$ juta)**

Tahun	Pinjaman Yen	Bantuan Hibah	Kerjasama Teknik	Total	Referensi	
					APBN Indonesia	GDP Indonesia
1960	-	14,28	-	14,28	n.a.	n.a.
1961	-	30,81	-	30,81	n.a.	n.a.
1962	-	22,04	-	22,04	n.a.	n.a.
1963	-	17,93	-	17,93	n.a.	n.a.
1964	-	15,01	-	15,01	n.a.	n.a.
1965	-	21,52	-	21,52	n.a.	n.a.
1966	22,43	27,86	0,29	50,58	n.a.	n.a.
1967	91,73	20,73	0,47	112,93	543,51	5.667,76
1968	53,31	30,42	-	83,73	467,94	7.076,47
1969	56,90	7,34	1,60	65,84	1.004,35	8.338,34
1970	101,79	24,16	2,89	128,84	1.226,18	9.205,89
1971	110,26	12,09	2,77	125,12	1.493,36	9.370,33
1972	109,63	7,04	4,48	121,15	1.811,08	10.99,59
1973	141,78	3,62	7,08	152,48	2.078,07	16.273,25
1974	216,38	8,78	7,44	232,60	3.809,72	25.802,41
1975	198,88	0,43	10,32	209,63	6.589,64	30.463,86
1976	205,56	0,83	12,02	218,41	8.483,37	37.269,16
1977	153,08	8,15	16,05	177,28	10.234,46	45.808,92
1978	237,47	14,33	25,00	276,80	10.918,12	51.456,30
1979	242,30	19,94	23,65	285,89	11.129,03	51.400,60
1980	366,87	26,51	32,71	426,09	16.837,32	72.481,87
1981	329,43	15,05	37,34	381,82	22.002,61	92.008,79
1982	332,65	19,47	37,18	389,30	23.596,62	94.456,78
1983	293,14	20,04	39,99	353,17	18.218,45	85.368,95
1984	212,65	30,03	43,66	286,34	20.040,55	87.612,34
1985	206,41	31,06	45,28	282,75	20.751,32	88.607,75
1986	227,54	46,75	63,07	337,36	16.702,22	86.309,41
1987	804,55	68,71	67,88	941,14	13.859,54	78.249,23
1988	1.121,50	49,40	93,79	1.264,69	17.182,18	88.624,90
1989	1.260,57	44,66	101,82	1.407,05	20.663,14	101.470,01
1990	964,81	58,39	108,68	1.131,88	23.265,01	114.426,34
1991	1.169,73	79,73	133,07	1.382,53	25.921,39	128.168,20
1992	1.469,06	85,73	141,72	1.696,51	27.640,99	139.116,32
1993	1.303,45	67,61	157,93	1.528,99	29.860,57	158.006,80
1994	1.084,37	72,28	177,69	1.334,34	32.280,00	176.892,28
1995	1.155,14	66,47	203,67	1.425,28	34.698,77	202.131,09
1996	1.234,15	64,41	163,31	1.461,87	38.686,76	227.369,68
1997	739,61	66,57	148,39	954,57	34.745,20	215.748,72
1998	1.034,51	114,60	123,99	1.273,10	26.352,96	95.445,49
1999	1.994,04	100,54	130,80	2.225,38	27.077,65	140.001,15
2000	945,66	52,07	144,60	1.142,33	23.395,29	165.020,93
2001	702,83	45,16	117,27	865,26	30.772,74	164.145,45
2002	441,59	63,54	126,46	631,59	36.945,76	200.110,83
2003	946,77	82,36	120,66	1.149,79	43.206,99	237.416,25
2004	452,52	23,47	105,96	583,95	41.879,10	256.837,29
2005	1.072,18	172,21	98,40	1.342,79	40.987,08	286.969,05
2006	882,83	60,67	91,11	1.034,61	70.711,36	364.459,37
Total	24.690,06	1.939,16	2.907,49	29.597,35	-	-

Sumber: OECD/DAC, Japan's Official Development Assistance (ODA) White Paper 2007 (Departemen Luar Negeri Jepang), IMF, Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS).<sup>101</sup>

<sup>101</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/datastat\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/datastat_01.htm)

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan jumlah bantuan pada tahun 1997. Adanya penurunan jumlah bantuan yang diperlihatkan tabel pada tahun 1997 merupakan suatu indikator bahwa Jepang pada saat itu mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah bantuannya terhadap Indonesia, dikarenakan pada saat itu kondisi dalam negeri Jepang juga mengalami masalah perekonomian.<sup>102</sup> Selain itu turunnya kepercayaan pemerintah Jepang terhadap pemerintah Indonesia dikarenakan adanya berbagai skandal yang terjadi di Indonesia seperti kasus BaliGate, indikasi korupsi bantuan beras dari Jepang dan lain sebagainya merupakan faktor yang menyebabkan pemerintah Jepang mengurangi jumlah bantuannya terhadap Indonesia.<sup>103</sup>

Jika dilihat dari perbandingan antara pinjaman, hibah dan bantuan teknis Jepang terhadap Indonesia dapat kita lihat bahwa pinjaman memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan hibah dan bantuan teknis. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa Jepang mengambil keuntungan dari berbagai bantuan terhadap Indonesia. Dengan melihat data antara pinjaman jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan hibah maupun bantuan teknis dapat terlihat bahwa sebaiknya pihak Indonesia dapat memperjuangkan dihapuskannya hutang luar negeri. Dalam hal ini, besarnya hutang luar negeri suatu negara merupakan indikator dari lemahnya perekonomian suatu negara selain itu juga dengan besarnya hutang luar negeri memungkinkan negara pendonor untuk mendikte suatu keadaan maupun suatu kebijakan dari negara penerima donor yang dapat mengakibatkan sikap tidak independen suatu negara. Oleh karena itu dengan adanya penghapusan hutang luar negeri diharapkan dapat menjadi pemicu untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

---

<sup>102</sup> Dominic Kelly Op Cit, hal. 97.

<sup>103</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/09/EB/mbm.19990209.EB93436.id.html>

Pada masa krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 Jepang memberikan bantuannya kepada Indonesia. Dan bantuan tersebut melalui jalur bilateral dan multilateral. Bantuan tersebut antara lain:

#### IV.1.1 Miyazawa Plan

Jepang merupakan negara pemberi bantuan luar negeri terbesar terhadap Indonesia. Sejak awal terjadinya krisis Asia hingga bulan September 1998 Jepang telah mengumumkan pemberian berbagai bentuk bantuan bagi negara-negara Asia. Berbagai bentuk bantuan tersebut diberikan Jepang melalui berbagai jalur baik bilateral maupun multilateral. Untuk dapat memperbaiki ekonomi negara-negara Asia Jepang berinisiatif untuk memberikan bantuan ekonomi bagi negara-negara Asia. Walaupun berbagai bantuan sudah diberikan terhadap negara-negara di kawasan Asia namun hingga pertengahan tahun 1998 kondisi perekonomian negara-negara Asia belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih baik lagi.

Bahkan di Indonesia krisis yang ada tidak hanya berkembang menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan tetapi juga memicu terjadinya instabilitas politis dan keamanan.<sup>104</sup> Hal inilah yang mendorong Jepang untuk membuat inisiatif bantuan baru guna mempercepat penanganan kesulitan ekonomi dan pemulihan negara-negara Asia. Inisiatif bantuan tersebut dinamakan *New Miyazawa Initiative* yang lebih dikenal dengan nama *Miyazawa plan*. Inisiatif bantuan tersebut pertama kali diumumkan secara formal oleh Jepang pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara *Group 7 (G7)* pada tanggal 3 Oktober 1998 di Washington, Amerika Serikat.<sup>105</sup>

Dalam pertemuan tersebut juga dikemukakan oleh delegasi Jepang mengenai perlunya bantuan melalui *Asian Monetary Fund* namun ditolak oleh delegasi Amerika Serikat dan pada saat itu menteri keuangan Jepang Kiichi Miyazawa membuat inisiatif untuk dapat membantu negara-negara Asia yang hingga kini dikenal dengan nama *New Miyazawa Initiative program* atau *Miyazawa Plan*. Paket bantuan tersebut menyediakan dana US\$30 miliar, US\$15 miliar diantaranya dianggarkan untuk memulihkan perekonomian Asia dalam

<sup>104</sup> Lili Romli, Op cit.

<sup>105</sup> G-7 Fails To Take Coordinated Actions Calls on Japan to Solve Financial Problems dalam Japan Economics Institute Report, No 38B (9 Oktober 1998), hal. 9.

jangka waktu menengah dan panjang sisanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Dalam realisasinya keputusan dalam bantuan Miyazawa Plan ditentukan oleh Jepang melalui perundingan bilateral dengan masing-masing negara penerima. Hingga pada bulan Februari 1999 keputusan pemberian bantuan diumumkan Jepang kepada lima negara penerima yaitu Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Keputusan pemberian bantuan Miyazawa plan ke Thailand dan Malaysia diumumkan pada tanggal 16 Desember 1998, dimana Thailand mendapatkan bantuan dalam bentuk pinjaman sebesar US\$1,85 milyar dan Malaysia mendapatkan pinjaman sebesar US\$1,5 milyar.<sup>106</sup> Keputusan pemberian pinjaman kepada Filipina diumumkan Jepang pada tanggal 5 Januari 1999 dengan jumlah sebesar US\$ 1,4 milyar.<sup>107</sup> Sedangkan keputusan pemberian Miyazawa plan ke Korea Selatan telah lebih dulu diumumkan Jepang pada tanggal 7 Oktober 1998 dengan jumlah sebesar US\$ 3 milyar.<sup>108</sup>

Keputusan pemberian bantuan Miyazawa Plan yang paling akhir diumumkan yaitu pada tanggal 5 Februari 1999.<sup>109</sup> Pemerintah Indonesia mendapat kucuran US\$ 2,4 miliar untuk Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Jepang, Eisuke Sakakibara, memastikan komitmen pemerintah Jepang itu. Dari pinjaman US\$ 2,4 miliar, US\$ 1,5 miliar akan disalurkan melalui Bank Exim Jepang, dan US\$ 900 juta melalui Badan Kerja Sama Ekonomi Jepang (OECE).

Adapun penggunaan dari bantuan Miyazawa yang diarahkan oleh Jepang bagi negara-negara penerima antara lain:

- A.) Membantu restrukturisasi hutang-hutang swasta, stabilisasi dan penyehatan sektor keuangan.
- B.) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial.
- C.) Mendorong perekonomian untuk menaikkan kesempatan kerja.
- D.) Menyelesaikan kredit macet bagi pembiayaan perdagangan dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah.

<sup>106</sup> Japanese Financial Support to Thailand and Malaysia under the Framework of The New Miyazawa Initiative dalam *Jpapa's Monthly Financial Review*, no 306 (Januari 1999), hal. 35.

<sup>107</sup> Japanese Financial Support to Philippines under The Framework of The New Miyazawa Initiative dalam *Japan's Monthly Financial Review*, no 308 (Maret 1999), hal. 8.

<sup>108</sup> Obuchi Kim Pledge Economic Cooperation: Japan Offers US\$3 Billion in New Loans dalam *Japan Institute Report*, no 39B (16 Oktober 1998), hal. 9.

<sup>109</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/09/EB/mbm.19990209.EB93436.id.html>

**Tabel IV. 3**  
**Bantuan Miyazawa Plan Yang Diberikan Jepang Untuk Indonesia**  
**Berdasarkan Keputusan Tanggal 5 Februari 1999**

Bentuk Bantuan	Tujuan Bantuan	Jalur Pemberian Bantuan	Keterangan bantuan
1. Pinjaman ODA sebesar US\$ 900 juta	1. Program Jaring Pengaman sosial 2. Program Pembangunan Sektor Kesehatan dan Gizi 3. Program Penyesuaian JPS	1. Diberikan melalui jalur bilateral. 2. Diberikan melalui jalur Co Financing dengan Bank Pembangunan Asia 3. Diberikan melalui jalur Co Financing dengan Bank dunia	Pinjaman ini merupakan bagian dari pinjaman jangka menengah dan panjang yang pengucurannya akan dilakukan dalam waktu 3 tahun terhitung dari mulai penandatanganan nota perjanjian pinjaman.
2. Pinjaman ODA sebesar US\$1,5 milyar	1. Penyediaan Extend Fund Facility 2. Program Restrukturisasi Sektor Tenaga Listrik 3. Pendukung Reformasi Kebijakan (Policy Reform Support Loan)	1. Diberikan melalui jalur Co Financing dengan IMF 2. Diberikan melalui jalur Co Financing dengan Bank Pembangunan Asia 3. Diberikan melalui jalur Co Financing dengan Bank Dunia	

Sumber: Biro kerjasama Ekonomi Bilateral BAPPENAS (Draft Miyazawa Plan)

Dalam paket bantuan Miyazawa Plan bantuan Jepang yang semula berjumlah US\$2.4 miliar dalam perkembangannya mengalami kenaikan menjadi US 2.78 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

(A.) Paket Bantuan sebesar US\$ 1.28 miliar yang terdiri dari :

- (i) US\$ 380 juta untuk Jaring Pengaman Sosial
- (ii) US\$ 300 juta untuk pembangunan kesehatan dan pangan
- (iii) US\$ 600 juta untuk penyesuaian JPS

(B) Paket Bantuan non ODA (Kredit komersial/ ekspor tanpa didalamnya terdapat unsur hibah lebih dari 25% dengan peruntukkan pembangunan ekonomi Indonesia) sebesar US\$ 1.5 milyar yang terdiri dari:

- (i) US\$ 1 miliar untuk Co Financial dengan IMF
- (ii) US\$ 400 juta untuk pembangunan dan restrukturisasi energi Co Financial dengan ADB
- (iii) US\$ 100 juta untuk bantuan dalam mendukung kebijakan reformasi.<sup>110</sup>

#### IV.1.2 Special Yen Loan Facility

*Special Yen Loan Facility* digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi Asia dan negara lain. Pinjaman Yen adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).<sup>111</sup>

Pinjaman *Special Yen Loan Facility* disediakan oleh Jepang untuk Indonesia sebesar 600 miliar yen untuk jangka waktu tiga tahun atau 200 miliar per tahun yang dimulai bulan Maret 1999 sampai dengan April 2000 dan seterusnya. Pinjaman kategori *Special Yen Loan Facility* ini berbunga lunak sebesar 0.75% sampai dengan 1% per tahun dengan masa pembayaran 40 tahun. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kandungan

<sup>110</sup> KBRI Tokyo, Laporan Tahunan 1999-2000, hal. 36.

<sup>111</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm)

impornya mayoritas berasal dari Jepang.<sup>112</sup> Mekanisme pemberian proyek yang dibiayai SYL berdasarkan tingkat kematangan proyek, sudah masuk dalam blue book BAPPENAS, memiliki banyak kandungan impor dari Jepang, memberi dampak terhadap peningkatan lapangan kerja, ekonomi wilayah, lingkungan hidup dan aspek pembebasan tanah. Pemilihan proyek secara umum didanai oleh pemerintah Jepang dengan menyaring usulan yang disampaikan dari departemen – departemen teknis di Indonesia.<sup>113</sup>

#### IV.1.3 ODA (*Official Development Assistance*)

Definisi ODA menurut Komite Bantuan Pembangunan adalah:

*“ODA is the aid that given to develop country by government or organization from OECD;s country. The donor of ODA naturally have a motivation to help the receiver country to developing their economy and the people, so that it will decrease the different between rich cuntry and poor country. In spite of there cases where the donor country intend to chase their own at the same time.”<sup>114</sup>*

ODA adalah bantuan yang diberikan kepada negara berkembang oleh pemerintah atau organisasi swasta dari negara anggota OECD. Para pemberi ODA pada dasarnya mempunyai motivasi untuk membantu negara penerima bantuan membangun ekonomi dan masyarakatnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin. Namun ada juga kasus-kasus dimana negara donor bermaksud mengejar kepentingannya sendiri pada saat bersamaan. Dalam hal ini Jepang merupakan anggota dari OECD (*Organisation For Economic Cooperation and Development*) yang merupakan organisasi negara-negara pemberi bantuan.

Adapun klasifikasi ODA Jepang antara lain: pinjaman yen, hibah dan bantuan teknis. Pinjaman Yen adalah, pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan bunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan. Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, *Japan Bank for*

<sup>112</sup> Pinjaman Yen KOMPAS 26 Juli 1999.

<sup>113</sup> ibid

<sup>114</sup> Siti Daulah Wiratno, *Kebijakan Bantuan Ekonomi Jepang Kepada Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Jurnal Studi Jepang, 1991), hal. 55.

*International Cooperation (JBIC)*. Bantuan dana hibah adalah bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali. Kerjasama teknik adalah kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan "upaya pembangunan manusia" yang akan memegang peranan didalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik serta pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, maka Jepang menerapkan cara dengan mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey, atau kesemuanya ini tercakup dalam bentuk "Proyek Kerjasama Teknik" dan lain-lain. Kerjasama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama, "*Japan International Cooperation Agency (JICA)*".<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm)



**Tabel IV.4**  
**Pinjaman Yen Terhadap Indonesia Tahun 1997-Tahun 2000**  
**(Dalam Ratus Juta Yen)**

TAHUN	NAMA	JUMLAH	TOTAL
1997	Proyek PLTB Tarahan	340.23	2,152.48
	Pembangkit Listrik tenaga Air ke Hulu Cilikan (E/S)	14.36	
	Proyek Pembangunan Fasilitas Kabel Listrik Inti Jawa-Bali (III)	109.18	
	Proyek Perbaikan Jalan Pantai Timur Sumatra	66.52	
	Proyek Perbaikan Jalan Utama dalam Kota	125.58	
	Proyek Pembuatan Rel Ganda Kereta Jalur Utama Utara, Jawa (II)	87.48	
	Proyek Pembangunan Depo Kereta Depok	92.23	
	Proyek Pengembangan Bandara Palembang (I)	88.26	
	Proyek Peremajaan Pelabuhan Kecil dan Menengah di Indonesia Bagian Timur	31.11	
	Proyek Pengembangan Pelabuhan Dumai (II)	38.19	
	Proyek Pengembangan UGM	74.99	

	Proyek Pengendalian Banjir Medan	96.97	
	Proyek Pencegahan Banjir Sungai Ciliwung-Cisadane (I)	173.26	
	Proyek Pengendalian Wilayah Hulu Sungai Citarum (II)	47.22	
	Proyek Irigasi Way Sekampung (III)	92.16	
	Proyek Manajemen Irigasi Skala Kecil (III)	167.01	
	Proyek Irigasi Gilirang (E/S)	6.17	
	Proyek Perbaikan Infrastruktur Daerah (II)	297.38	
	Proyek Penerapan Sistem Alat Timbang Resmi (E/S)	4.18	

1998	Kredit Sektor Program (Tahap 1, Bidang Pertanian Perkebunan dan Perikanan, Lain-Lain)	500	2,304.80
	Kredit Sektor Program (Tahap 2, Bidang Transportasi, Asuransi, Medis,	1,000.00	

	Pinjaman Jaring Pengaman Sosial	452	
	Program Pengembangan Sektor Kesehatan dan Nutrisi	352.8	
<b>1999</b>	Pinjaman Penyesuaian Jaring Pengaman Sosial	719.28	<b>719.28</b>
<b>2000</b>	Elektrifikasi Rel Kereta dan Pengandaan Rel Jalur Utama, Jawa (Tahap 1)	410.34	<b>991.65</b>
	Proyek Irigasi Batang Hari (2)	76.39	
	Proyek Pengembangan Sekolah Pelatihan Maritim	76.69	
	Kredit Sektor Pengembangan Sumber Daya Air (II)	186.76	
	Proyek Perbaikan Administrasi Perpajakan (Diklat SDM, IT)	41.08	
	Proyek Perbaikan Infrastruktur Daerah (III)	200.39	
<b>JUMLAH</b>			<b>6168,21</b>

Sumber: ODA Jepang untuk Indonesia<sup>116</sup>

<sup>116</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_loan.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm)

**Tabel IV.5**  
**Kerjasama Teknik Jepang Tahun 1997-Tahun 2000**  
**(Dalam Ratus Juta Yen)**

TAHUN	NAMA	JUMLAH	TOTAL
1997	Penerimaan Peserta Pelatihan	721 orang	123.09
	Pengiriman Tenaga Ahli	428 orang	
	Pengiriman Tim Studi	650 orang	
	Tenaga Ahli Muda	35 orang	
	Penyediaan Peralatan	1,336.3 (¥ juta)	
	Kerjasama Teknik Berbentuk Proyek	27 projects	
	Studi Pembangunan	30 projects	
1998	Penerimaan Peserta Pelatihan	2,522 orang	109.27
	Pengiriman Tenaga Ahli	416 orang	
	Pengiriman Tim Studi	563 orang	
	Tenaga Ahli Muda	22 orang	
	Penyediaan Peralatan	1,523.7 (¥ juta)	
	Kerjasama Teknik Berbentuk Proyek	24 projects	
	Studi Pembangunan	21 projects	
1999	Penerimaan Peserta Pelatihan	3,771 orang	101.78
	Pengiriman Tenaga Ahli	442 orang	
	Pengiriman Tim Studi	421 orang	
	Tenaga Ahli Muda	32 orang	
	Skema Sukarelawan Lainnya, dsb	18 orang	

	Penyediaan Peralatan	1,539.70 (¥ juta)	
	Proyek Kerjasama Teknik	3 projects	
	Studi Pembangunan	5 projects	

2000	Penerimaan Peserta Pelatihan	3,515 orang	100.65
	Pengiriman Tenaga Ahli	384 orang	
	Pengiriman Tim Studi	496 orang	
	Penyediaan Peralatan	1,178.25 (¥ juta)	
	Tenaga Ahli Muda	37 orang	
	Skema Sukarelawan Lainnya	28 orang	
<b>JUMLAH</b>			<b>434.79</b>

Sumber: ODA Jepang untuk Indonesia<sup>117</sup>

<sup>117</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_protech.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_protech.htm)

**Tabel IV.6**  
**Bantuan Hibah Jepang Kepada Indonesia Tahun 1997-Tahun 2000**  
**(Dalam Ratus Juta Yen)**

TAHUN	NAMA	JUMLAH	TOTAL
1997	Rencana Pembangunan Pusat Rehabilitasi Lapangan kerja Penyandang Cacat (Utang Negara Tahap 2/2) (8.26)	8.26	93.27
	Rencana Proyek Listrik Daerah di Propinsi Aceh (6.43)	6.43	
	Rencana Peremajaan Peralatan Irigasi Wilayah Timur (Tahap 2/2) (4.66)	4.66	
	Rencana Renovasi Pusat Pelatihan Tenaga Medis Sulawesi Selatan dan Utara (12.24)	12.24	
	Rencana Peremajaan Peralatan Irigasi (7.67)	7.67	
	Hibah Darurat kesulitan Ekonomi (Bantuan Obat-Obatan) (10.20)	10.2	
	Hibah Darurat kesulitan Ekonomi (Bantuan Bahan Dasar Obat, Susu Bubuk, dan Lain-Lain) (30.00)	30	

	Bantuan Akar Rumpur (34 Proyek) (1.81)	1.81	
	Bantuan Peningkatan Produksi Bahan Makanan (12.00)	12	
1998	Rencana Perbaikan PLTA Gresik Turbin 1,2 (Tahap 1/2) (11.82)	11.82	208.84
	Hibah Non Proyek (30.00)	30	
	Hibah Darurat Pinjaman Beras Pemerintah Bantuan Ongkos Angkut Ekspedisi Kapal Laut (73.35)	73.35	
	Hibah Darurat Bantuan Demokratisasi (Melalui UNDP) (36.55)	36.55	
	Rencana Perbaikan Pendidikan Matematika dan Fisika untuk SD dan SMP (Tahap 1/3) (5.49)	5.49	
	Bantuan Makanan (4.50)	4.5	
	Bantuan Bahan Pangan (18.50)	18.5	
	Tambahan bantuan Makanan (14.50)	14.5	
	Rencana Sosialisasi Vaksinasi Tetanus dan Campak (2.51)	2.51	

	Hibah Akar Rumput (34 Proyek) (2.46)	2.46	
	Rencana Peremajaan Peralatan Pendidikan Geologi (7.56)	7.56	
	Rencana Peremajaan Peralatan Pusat Bantuan Teknik Selatan-Selatan (1.33)	1.33	
	Perlengkapan Olah Raga untuk IKIP Jakarta(0.25)	0.25	
1999	Rencana Perbaikan PLTA Gresik Turbin 1,2 (2/2) (11.34)	11.34	54.9
	Rencana Perbaikan Jalan Pemadam kebakaran Hutan Taman Nasional (1/3) (1.13)	1.13	
	Rencana Perbaikan Pendidikan Fisika dan Matematika SD, SMP (2/3) (13.24)	13.24	
	Rencana Perbaikan Alat Statistik (3.62)	3.62	
	Rencana Perbaikan Fasilitas Irigasi Wilayah Timur (5.26)	5.26	



	Hibah Darurat (Bantuan Demokratisasi) (Melalui UNDP) (4.17)	4.17	
	Bantuan Makanan Korban kebakaran Nasional (Melalui WFP) (13.50)	13.5	
	Peralatan Dokumentasi Buku-Buku Tua di Perpustakaan Nasional (0.45)	0.45	
	Hibah Darurat (Bantuan Pengungsi, dan lain-lain) (Timor Timur) (Bantuan LSM) (0.44)	0.44	
	Hibah Akar Rumput (28 Proyek) (1.75)	1.75	
<b>2000</b>	Rencana Peremajaan Fasilitas Air Bersih Daerah di Sulawesi (1/3) (7.32)	7.32	<b>74.5</b>
	Program Keluarga Berencana (3.66)	3.66	
	Rencana Perbaikan Jalan Pemadam kebakaran Hutan Taman Nasional (2/3) (1.53)	1.53	
	Rencana Perbaikan Pendidikan SD, SMP (3/3) (7.94)	7.94	
	Rencana Penanggulangan Tetanus Balita	1.4	

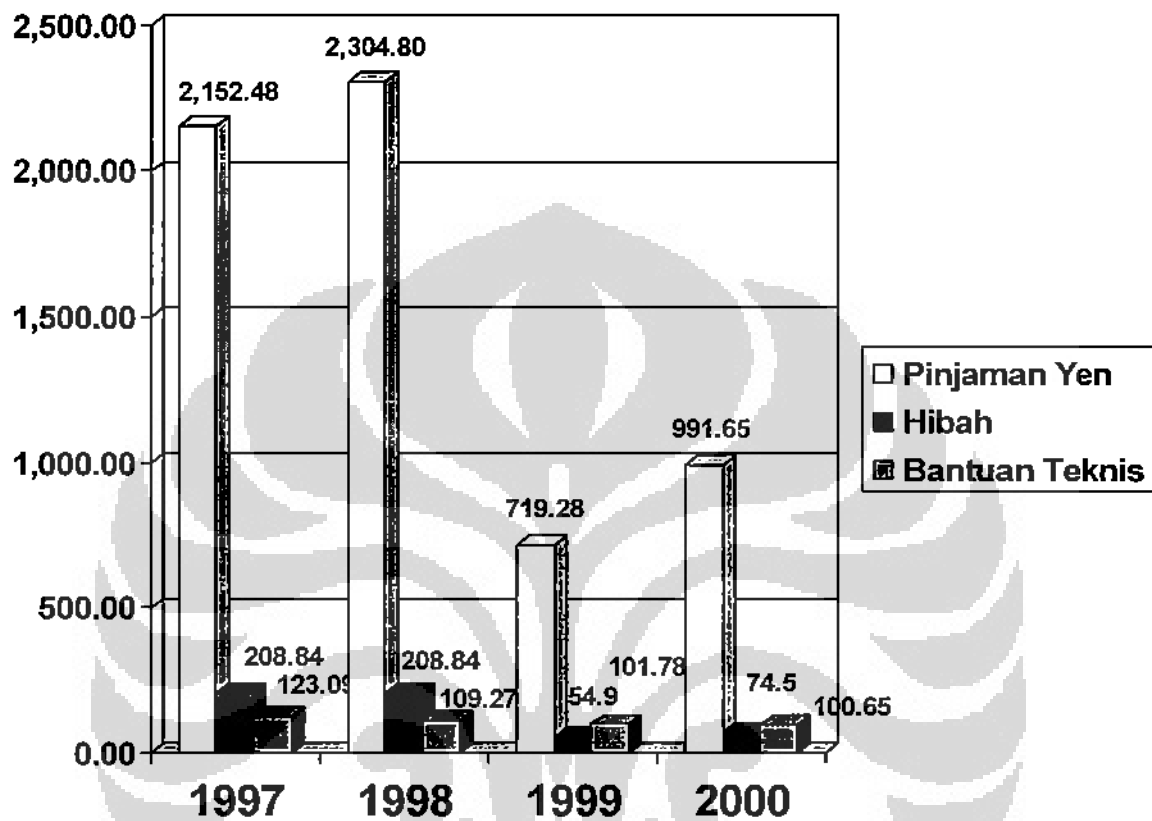
Rencana Perlengkapan Penanggulangan kebakaran Hutan (3.09)	3.09
Hibah Darurat (Bantuan Pengungsi Maluku) (1.05)	1.05
Hibah Non Proyek (25.00)	25
Rencana Perluasan Pelatihan Perikanan Semarang (6.32)	6.32
Tambahan Bantuan Makanan (14.00)	14
Peralatan Audio Visual untuk Pusat Pengembangan Teknik Pendidikan (0.44)	0.44
Hibah Akar Rumput (43 Proyek) (2.75)	2.75
<b>JUMLAH</b>	<b>431.51</b>

Sumber: ODA Jepang untuk Indonesia <sup>118</sup>

<sup>118</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_grant.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_grant.htm)

Grafik IV.1

Pinjaman Yen, Hibah dan Bantuan Teknis (Dalam Ratus juta Yen)



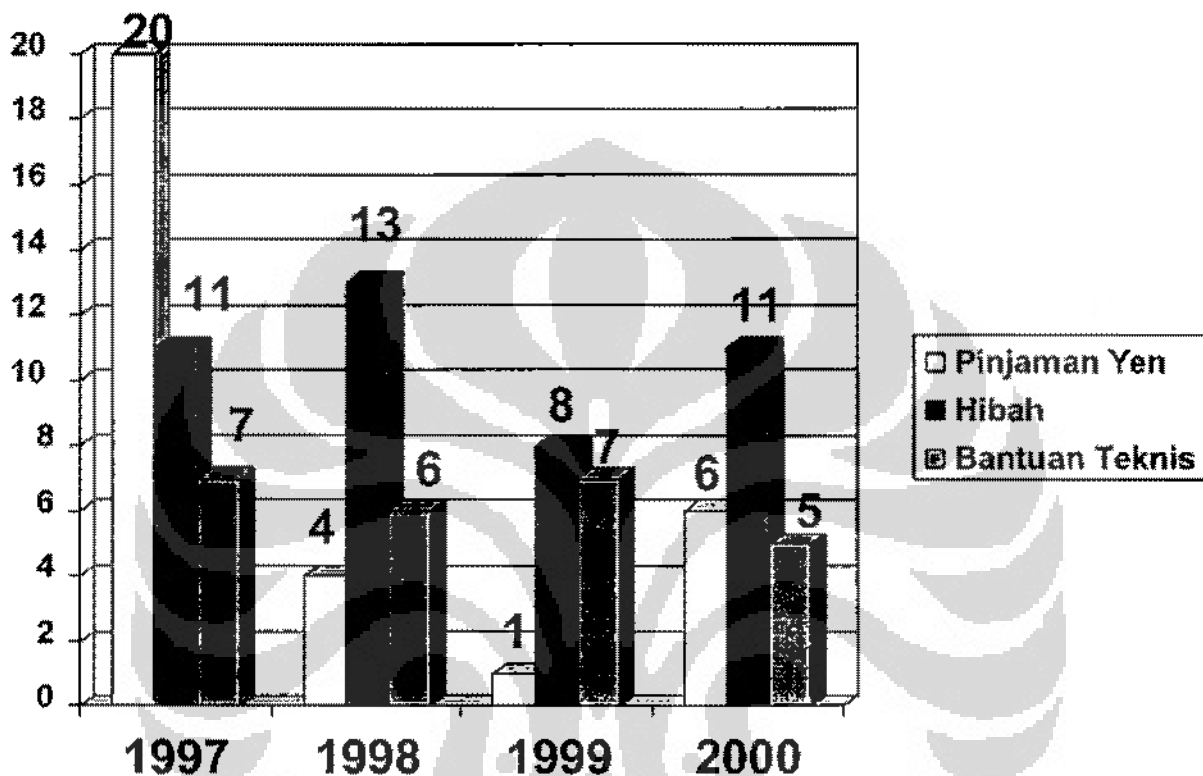
Dilihat dari jumlah proyek yang ada dan nilai proyek yang ada dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat terlihat bahwa jumlah pinjaman yen dalam akumulasinya bila dibandingkan dengan hibah (431.51) dan bantuan teknis (434.79) adalah yang terbesar ( 6168,21). Dilihat dari data tersebut, adanya hutang yang besar Indonesia terhadap Jepang merupakan suatu indikator lemahnya ekonomi Indonesia sebagai negara yang memiliki hutang. Jumlah hibah maupun bantuan teknis yang diberikan Jepang terhadap Indonesia bisa dikatakan tidak sebanyak jumlah pinjaman/ hutang Indonesia terhadap Jepang.

Besarnya hutang Indonesia terhadap Jepang merupakan suatu indikator adanya motivasi komersial seperti yang dikatakan oleh David Arase. Selain itu dengan adanya hutang Indonesia terhadap Jepang merupakan suatu pengikat hubungan antara Jepang dengan Indonesia. Dalam hal ini suatu hal yang dikhawatirkan adalah adanya konversi hutang menjadi kepemilikan saham BUMN

(Badan Usaha Milik Negara) strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan adanya konversi hutang Indonesia menjadi kepemilikan saham Jepang terhadap BUMN Indonesia dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan didalamnya dan dalam hal ini BUMN sebaiknya dikuasai oleh negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu adanya wacana untuk dihapuskannya hutang Indonesia merupakan suatu hal yang sebaiknya diperjuangkan. Dalam hal ini jika suatu negara memiliki aset berharga di negara lain merupakan suatu motivasi strategis jangka panjang. Dengan adanya kepemilikan saham dalam suatu BUMN negara tersebut dapat memenuhi keinginannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia untuk selalu berusaha maksimal dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Grafik IV.2  
Jumlah Proyek



Dilihat dari jumlah proyek yang ada antara pinjaman yen, hibah dan bantuan teknis dilihat dari kaitannya antara jumlah proyek yang ada dan jumlah uang tidak selamanya berbanding lurus. Sebagai contoh, dapat dilihat dari grafik yang ada pada tahun 1998 dimana jumlah pinjaman total proyeknya hanya sedikit (hanya 4 proyek) dibandingkan dengan hibah (13 proyek) dan bantuan teknis (6 proyek). Namun demikian jika dilihat dari jumlah uangnya pada tahun 1998, pinjaman yen (2,304.80) adalah yang terbesar dibandingkan dengan hibah (208.84) maupun bantuan teknis (109.27).

Dalam hal ini berbagai proyek yang ada diantaranya adalah kesehatan, pembangunan, pangan, pendidikan hingga bantuan dalam bidang politik melalui UNDP (0) merupakan suatu hal yang juga terkait dengan berbagai kepentingan Jepang itu sendiri. Dengan adanya bantuan Jepang dalam bidang politik melalui UNDP terhadap Indonesia dan stabilnya situasi politik di Indonesia membuat

keadaan di Indonesia menjadi aman. Selain itu dengan adanya berbagai bantuan kesehatan, pangan maupun pendidikan juga membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik produk-produk Jepang dapat terserap oleh pasar Indonesia. Dengan adanya bantuan kesehatan juga menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif. Sehingga para pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini sesuai dengan empat motivasi yang disebutkan oleh David Arase yaitu motivasi ekonomi, motivasi strategi, motivasi kemanusiaan dan motivasi komersial dapat terlihat dari berbagai elemen dalam berbagai bentuk bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia.

#### IV.2 Kepentingan Ekonomi Jepang

Strategi Jepang dalam mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan ODA. Kepentingan ekonomi membantu kelompok bisnis Jepang yang ada di Indonesia memiliki keterkaitan antara bantuan, perdagangan maupun investasi Jepang di Indonesia.

Dalam hal ini Jepang sebagaimana negara industri lainnya juga memiliki tujuan bagi kepentingan nasionalnya. Dengan adanya berbagai bantuan ekonomi tersebut Jepang juga mendapat keuntungan ekonomi secara timbal balik dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selain itu keterbatasan Jepang akan sumber daya alam yang dimiliki Jepang menyebabkan Jepang harus memiliki pasokan bagi kebutuhan akan bahan-bahan mentah, energi serta berbagai hasil tambang lainnya untuk keperluan Jepang itu sendiri. Sebagai contoh kebutuhan Jepang akan minyak mentah Indonesia sangat tinggi untuk kelangsungan hidup industri-industri di Jepang dan menyerap sekitar 70% ekspor minyak Indonesia.<sup>119</sup> Selain itu Jepang juga menjadi konsumen utama kayu (plywood) dari Indonesia untuk sektor real estate mereka. Sejak 1993 sampai dengan 1996 impor plywood Jepang dari Indonesia senilai lebih dari US\$ 1 milyar.<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Syamsul Hadi, *Op Cit*, hal. 329.

<sup>120</sup> *Ibid*.

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang sudah berlangsung sejak lama. Indonesia merupakan mitra penting Jepang di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara penyuplai sumber-sumber alam yang dibutuhkan Jepang baik untuk kegiatan industrinya maupun untuk konsumsi masyarakatnya. Selain itu populasi masyarakat Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Jepang.<sup>121</sup> Sedangkan bagi Indonesia Jepang juga merupakan pasar utama bagi produk Indonesia terutama produk sumber alam selain itu Jepang juga merupakan salah satu negara utama penyuplai mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan oleh industri Indonesia.<sup>122</sup> Ekspor Jepang ke Indonesia didominasi produk-produk jadi seperti mesin industri, alat transportasi (mobil, motor, dan lain sebagainya), maupun barang logam.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Lim Hua Sing, *Japan's Role in ASEAN: Issues and Prospects* (Singapore: Times Academic Press, 1994), hal. 120.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Tadashi Sato, *Japan's Economic Relation With Indonesia*, dalam Japan Economic Institute Report no 22 (1993), hal. 4.

**Tabel IV. 7**  
**Ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN Periode Tahun 1990-1996**  
**(Dalam juta US\$)**

Tahun Negara	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Total
Indonesia	5,040	5,613	5,576	6,022	7,672	9,971	9,073	48,967
Thailand	9,126	9,431	10,366	12,261	14,702	19,715	18,292	93,893
Malaysia	5,511	7,635	8,116	9,649	12,360	16,795	15,352	75,418
Filiphina	2,504	2,659	3,517	4,814	5,892	7,098	8,417	34,901
Total	32,889	37,551	40,549	49,986	60,875	77,502	73,066	372,418

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Dari tabel IV. 7 dapat dilihat bahwa periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 ekspor Jepang ke Indonesia dan ke negara ASEAN lainnya mengalami peningkatan. Dari tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa nilai ekspor Jepang ke Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai dengan 1996 hingga 80%. Selain itu, ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filiphina juga relatif mengalami peningkatan.

Sebagai contoh ekspor Jepang ke Filiphina yang mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996. sedangkan untuk ekspor Jepang ke negara Malaysia mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 1996. Untuk ekspor Jepang ke Thailand juga mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai dengan 1995 dan sedikit menurun pada tahun 1996. Namun demikian jika dilihat secara keseluruhan ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya relatif mengalami peningkatan dan merupakan suatu indikator yang cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi Jepang.



Tabel IV. 8  
Impor Jepang dari negara-negara ASEAN Periode Tahun 1990-1996  
(Dalam juta US\$)

Tahun Negara	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Total
Indonesia	12,721	12,770	12,244	12,479	12,917	14,214	15,216	92,561
Thailand	4,147	5,252	10,366	12,261	14,702	19,715	18,292	93,893
Malaysia	5,402	2,352	6,573	7,642	8,226	10,549	11,767	56,630
Filiphina	2,157	2,352	2,333	2,380	2,652	3,482	4,529	19,885
Total	27,998	30,260	30,194	33,674	37,975	46,940	51,093	258,134

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Impor Jepang dari Indonesia didominasi oleh berbagai sumber alam seperti minyak, gas alam, kayu, dan lain sebagainya.<sup>124</sup> Dari tabel IV. 8 dapat terlihat pada periode tahun 1990 sampai dengan 1996 impor Jepang mengalami peningkatan dan impor Jepang dari Indonesia adalah yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Impor Jepang dari Thailand pada tahun 1990 sampai dengan 1995 juga mengalami peningkatan dan sedikit penurunan pada tahun 1996. Impor Jepang dari Malaysia dari tahun 1991 menurun jika dibandingkan tahun 1990 dan mengalami peningkatan dari tahun 1991 sampai dengan 1996. Sedangkan impor Jepang dari Filiphina tahun 1991 meningkat dibandingkan tahun 1990, sedikit menurun pada tahun 1992 dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 1996.

Dalam hal ini adanya krisis yang melanda Indonesia menyebabkan meningkatnya harga barang-barang impor termasuk barang-barang dari Jepang dan lesunya pasar Indonesia. Hal ini berdampak pada kegiatan perdagangan Jepang dengan Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari menurunnya nilai ekspor dan impor Jepang dengan Indonesia pada tahun 1998.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> White Paper on Japan International Trade 1997(Tokyo: JETRO, 1998), hal. 189.

<sup>125</sup> Eiji Fukusawa, *the Effect of The Asian Crisis on The Japanese Economy* (Tokyo: Fuji Research Corp., 1998), hal. 3.

**Tabel IV. 9**  
**Ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN dan Persentase Perubahannya Periode Tahun**  
**1996-1998 (Dalam juta US\$)**

Tahun Negara	1996	1997	% Perubahan	1998	% Perubahan
Indonesia	9,073	10,168	12	4,275	-58
Thailand	18,292	14,583	-20	9,340	-36
Malaysia	15,352	14,510	-6	9,290	-36
Filiphina	8,417	8,689	3	7,244	-17
Total	73,066	69,477	-5	46,216	-34

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Dari tabel IV. 9 dapat terlihat mengenai dampak krisis terhadap kegiatan ekspor Jepang ke Indonesia yang pada tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 58% dibandingkan tahun 1997. Ekspor Jepang ke Indonesia tahun 1997 dibandingkan tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar 12%. Ekspor Jepang ke Thailand mengalami penurunan pada tahun 1997 dibandingkan tahun 1996 sebesar 20%, pada tahun 1998 ekspor Jepang ke Thailand juga mengalami penurunan sebesar 36%. Ekspor Jepang ke Malaysia mengalami penurunan pada tahun 1997 dibandingkan tahun 1996 sebesar 6 %, pada tahun 1998 ekspor Jepang ke Malaysia mengalami penurunan sebesar 36%.

Ekspor Jepang ke Filiphina mengalami peningkatan sebesar 3% pada tahun 1997 dibandingkan tahun 1996. Sedangkan pada tahun 1998 ekspor Jepang ke Filiphina mengalami penurunan sebesar 34% dibandingkan tahun 1997. Dilihat secara keseluruhan ekspor Jepang ke empat negara ASEAN termasuk didalamnya Indonesia mengalami penurunan sebesar 34%.

**Tabel IV. 10**  
**Impor Jepang dari negara-negara ASEAN dan Persentase Perubahannya Periode Tahun**  
**1996-1998 (Dalam juta US\$)**

Tahun Negara	1996	1997	% Perubahan	1998	% Perubahan
Indonesia	15,216	14,624	-4	10,800	-26
Thailand	10,227	9,565	-7	8,154	-15
Malaysia	11,767	11,365	-3	8,653	-24
Filiphina	4,529	5,013	11	4,408	-12
<b>Total</b>	<b>49,072</b>	<b>46,436</b>	<b>-5</b>	<b>36,722</b>	<b>-21</b>

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Dari tabel IV. 10 dapat terlihat mengenai dampak krisis terhadap kegiatan Impor Jepang dari Indonesia yang pada tahun 1998 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 26%. Impor Jepang dari Thailand mengalami penurunan pada tahun 1997 sebesar 7% dibandingkan tahun 1996. Pada tahun 1998 impor Jepang dari Thailand mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan tahun 1997. Impor Jepang dari Malaysia mengalami penurunan pada tahun 1997 sebesar 3% dibandingkan tahun 1996. Impor Jepang dari Malaysia pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan tahun 1997.

Impor Jepang dari Filiphina mengalami peningkatan tahun 1997 sebesar 11% dibandingkan tahun 1996. Pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun 1997. Secara keseluruhan impor Jepang dari empat negara ASEAN termasuk Indonesia didalamnya mengalami penurunan sebesar 21%.

Tabel IV. 11  
 Nilai Investasi Langsung Jepang ke Negara-Negara ASEAN  
 Periode Tahun 1989-1997 (Dalam Juta US\$)

Tahun Negara	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Total
Indonesia	631	1,105	1,193	1,676	813	1,759	1,605	2,500	2,350	23,551
Thailand	1,276	1,154	807	657	578	719	1,240	1,453	1,894	11,722
Malaysia	673	725	880	704	800	742	575	592	803	8,307
Filipina	202	258	202	160	207	668	718	579	531	4,625
Total	4,684	4,082	3,696	3,867	3,042	4,942	5,323	6,379	7,628	61,890

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Dari tabel IV. 11 dapat terlihat bahwa Indonesia merupakan negara penerima investasi langsung terbesar dari Jepang dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Dalam melihat kepentingan ekonomi Jepang terhadap Indonesia selain dari indikator nilai ekspor maupun impor, nilai investasi Jepang terhadap Indonesia juga merupakan indikator penting dalam melihat kepentingan ekonomi Jepang. Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia dengan total investasi sebesar 34.778,7 juta US\$ per 31 Agustus 1998.<sup>126</sup> Investasi langsung Jepang ke Indonesia ditujukan pada proyek yang berkaitan dengan sumber-sumber alam, jasa hingga teknologi maupun industri.<sup>127</sup> Bagi Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara favorit bagi tujuan investasi langsungnya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki daya tarik yang dibutuhkan bagi kegiatan investasi asing. Daya tarik tersebut antara lain: ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang murah, potensi pasar yang besar, kondisi perekonomian yang baik, stabilitas politik dan keamanan serta adanya kebijakan mengenai investasi asing yang kondusif.<sup>128</sup> Secara umum investasi langsung Jepang ke Indonesia bertujuan untuk:

- 1.) Mencari tenaga kerja dan biaya produksi murah.
- 2.) Mendapatkan sumber- sumber alam yang lebih murah.

<sup>126</sup> BKPM 31 Agustus 1998.

<sup>127</sup> Pasuk Phong Paichit, *The New Wave of Japanese Investment in ASEAN: Determinants and Prospects* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1990), hal. 51.

<sup>128</sup> Edward J. Lincoln, *Japan's New Global Role* (Washington DC: The Brookings Institution, 1993), hal. 160.

3.) Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar lokal bagi produk-produk Jepang.<sup>129</sup>

Dilihat dari hal tersebut Jepang memiliki keterbatasan akan adanya sumber daya alam yang tersedia di negaranya, dengan adanya ketersediaan bahan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia merupakan indikator akan adanya kepentingan ekonomi Jepang terhadap Indonesia. Selain itu tersedianya tenaga kerja yang murah di Indonesia merupakan bagian dari strategi Jepang untuk menekan biaya produksi agar biaya produksi dari produk-produk Jepang menjadi murah dan dapat bersaing kompetitif dengan produksi dari negara-negara lain.

Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Jepang untuk mendapatkan basis produksi dengan biaya produksi murah agar produk-produk Jepang tetap memiliki daya saing pada pasar internasional dan untuk mempertahankan serta meningkatkan pasar Indonesia bagi berbagai produk Jepang serta membangun basis ekspor untuk pangsa pasar negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa.

Ketersediaan akan adanya tenaga kerja murah, sumber-sumber alam, dan pasar yang potensial yang ada di Indonesia merupakan daya tarik Indonesia bagi Jepang. Dengan adanya pasar yang cukup potensial di Indonesia juga merupakan daya tarik bagi Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya investasi Jepang di Indonesia diharapkan investasi tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi Jepang. Oleh karena itu Jepang selalu mencermati keadaan dan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dan elemen ekonomi dari Jepang itu sendiri. Selain itu Jepang memiliki tekad bersama membangun kebersamaan ASEAN laksana kelompok angsa terbang (*flying geese*) menuju masyarakat Asia yang "damai, harmoni dan sejahtera" (*peace, harmony and prosperity*).<sup>130</sup> Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi Jepang. Hal ini ditegaskan oleh Yasuhisa Kawamura, Director of International Press Division, Kementerian Luar Negeri Jepang, kepada Kompas di Tokyo (19-07-2000).<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Lim Hua Sing, OP Cit hal. 156.

<sup>130</sup> <http://jurnalhaji.antara.co.id/berita/1253906602/regionalisme-ekonomi-asia-asean-plus-tiga>

<sup>131</sup> <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/07/18/0027.html>

Bagi Jepang, bantuan pembangunan resmi (*ODA/ Official Development Assistance*) sampai saat ini tetap merupakan prioritas sentral dan pilar utama kebijakanluamegerinya. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan Jepang di hampir semua lembaga donor dunia dan selalu menjadi penyumbang yang terbesar di Indonesia.<sup>132</sup> Menurut *Director of Southeast Asia Division Regional Department, Japan International Cooperation Agency (JICA)*, Teruyoshi Kumashiro, konsistensi sikap Jepang tersebut dikarenakan Indonesia dinilai sangat penting dimata Jepang.<sup>133</sup> Dalam hal ini Teruyoshi Kumashiro juga menjelaskan bahwa dana-dana bantuan Jepang tersebut berasal dari masyarakat Jepang yang membayar pajak. Dengan besarnya investasi Jepang di Indonesia, merupakan salah satu indikator bagi pentingnya Indonesia di mata Jepang.

---

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Ibid

**Tabel IV. 12**  
**Nilai Investasi Langsung Jepang ke Negara-Negara ASEAN**  
**Dan Persentase Perubahannya Periode Tahun 1996-1998 (Dalam Juta US\$)**

Tahun Negara	1996	1997	% Perubahan	1998	% Perubahan
Indonesia	2,500	2,550	2	1,053	-59
Thailand	1,453	1,894	30	1,341	-29
Malaysia	592	803	36	503	-37
Filiphina	579	531	-8	371	-30
Total	6,279	7,628	-22	3,891	-49

Sumber: Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997 dalam Japan Economic Institute Report no 46A, 11 Desember 1998.

Dari tabel IV. 12 dapat terlihat bahwa krisis yang melanda Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan investasi langsung Jepang terhadap Indonesia dan menimbulkan penurunan yang cukup drastis pada tahun 1998 sebesar 59%.

Dari berbagai indikator ekspor, impor maupun investasi langsung Jepang terhadap Indonesia dapat terlihat bahwa krisis yang melanda Indonesia mengakibatkan penurunan dalam investasi langsung Jepang terhadap Indonesia dan penurunan kegiatan perdagangan Jepang terhadap Indonesia. Penurunan kegiatan perdagangan Jepang terhadap Indonesia dapat dilihat dari turunnya nilai ekspor dan impor Jepang terhadap Indonesia pada tahun 1998. Sedangkan penurunan kegiatan investasi langsung Jepang terhadap Indonesia juga dapat dilihat dari turunnya investasi Jepang terhadap Indonesia pada tahun 1998.

Dengan melihat berbagai indikator tersebut maka dapat terlihat bahwa Jepang memiliki kepentingan ekonomi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia dan berbagai bantuan Jepang terhadap Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Hal ini dikarenakan dengan pulihnya perekonomian Indonesia akan memungkinkan Jepang untuk dapat meningkatkan kembali volume ekspor maupun investasinya terhadap Indonesia. Peningkatan kegiatan ekspor terhadap Indonesia sangat penting bagi perekonomian Jepang yang pertumbuhan ekonominya sangat mengandalkan kegiatan ekspor.

Sedangkan peningkatan kegiatan investasi langsung Jepang terhadap Indonesia juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan basis produksi dengan biaya produksi murah agar produk-produk Jepang tetap memiliki

daya saing pada pasar internasional dan untuk mempertahankan serta meningkatkan pasar Indonesia bagi berbagai produk Jepang serta membangun basis ekspor untuk pangsa pasar negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa.<sup>134</sup>

Berbagai bantuan ekonomi yang diberikan Jepang terhadap Indonesia bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dan hal ini merupakan suatu indikator bahwa Jepang memiliki kepentingan yang cukup besar di Indonesia. Implementasi ODA Jepang juga tidak luput dari kritik.

David Arase memaparkan bahwa Jepang menggunakan ODA sebagai alat *buying power* atau membeli kekuasaan. Arase juga menggunakan istilah asli di Jepang untuk menyebut ODA yaitu *keizai kyouryoku* (kerjasama ekonomi), untuk memperlihatkan bahwa Jepang tidak melihat ODA sebagai bantuan (*aid/assistance*), tapi merupakan kerjasama ekonomi yang sarat dengan kepentingan bisnis dan ekonomi Jepang.<sup>135</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Pradjoto (12/5/2000) di Jakarta, ahli ekonomi hukum perbankan dalam menanggapi Konversi piutang menjadi kepemilikan saham (*debt to equity swap*) atas sebagian piutang perusahaan Jepang, Marubeni, menjadi 20 persen kepemilikan di perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Centre (CAPC), merupakan sebuah politik tingkat tinggi tekanan pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia.<sup>136</sup>

Hal ini disebut *Japanese Inc (Incorporation)*. Menurut Pradjoto, *Japanese Inc (Incorporation)* merupakan persekutuan kapitalisme gurita pengusaha dan pemerintah Jepang untuk mempertahankan hegemoni mereka, baik di dunia internasional maupun dalam hal bisnis lintas batas Jepang. Dalam hal ini berbagai bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia bukanlah "makan siang gratis."<sup>137</sup> Dengan memberi bantuan dan dukungan, saat itulah kapitalisme gurita *Japanese Inc* sedang berjalan. Ulah *Japanese Inc* dengan menggunakan piutang

<sup>134</sup> Seminar *Jakarta Japan Club Dengan Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia* dalam sesi *JETRO: Japanese Investment in Indonesia Past and Future* oleh Mr Sadanobu Kusaoke, 14 Oktober 2008.

<sup>135</sup> David Arase, *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid* (London: line Rienner, 1995), hal. 11.

<sup>136</sup> <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/12/0020.html>

<sup>137</sup> KOMPAS, Sabtu 13 Mei 2000, *Soal Masuknya Marubeni ke Chandra Asri Pemerintah Jepang Lakukan Politik Tingkat Tinggi*



Marubeni pada PT CAPC, menurut Pradjoto tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai kekayaan alam yang seharusnya dimiliki dan dikelola negara.<sup>138</sup> Dilihat dari hal tersebut Jepang memiliki kepentingan ekonomi jangka panjang. Seperti yang dikemukakan oleh Sueo Sudo, tujuan utama politik luar negeri Jepang adalah mempromosikan pembangunan ekonomi melalui pencarian sumber-sumber alam serta pasar luar negeri yang menguntungkan.<sup>139</sup>

Jepang juga ingin memberikan peran dan memberikan citra baik di mata dunia internasional seperti yang disebutkan dalam *Diplomatic Bluebook* (Dalam KTT Ekonomi G7 di Jerman, Köln, tanggal 18-20 Juni tahun 1999).<sup>140</sup> Jepang berkomitmen untuk dapat berperan secara aktif memperkuat arsitektur keuangan internasional. Dalam hal ini memaksimalkan sistem keuangan internasional dengan adanya berbagai reformasi dan perbaikan untuk memperkuat fundamental ekonomi internasional. Dengan adanya kerjasama internasional yang baik dan upaya agar krisis dapat dicegah diperlukan kerjasama internasional antar negara. Hal ini terdapat dalam enam skala prioritas:

1. Memperkuat dan mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan pengaturan.
2. Meningkatkan transparansi dan mempromosikan praktek-praktek terbaik.
3. Penguatan regulasi keuangan di negara-negara industri.
4. Memperkuat kebijakan makro ekonomi dan sistem keuangan di pasar negara berkembang.
5. Meningkatkan pencegahan krisis dan manajemen, dan melibatkan sektor swasta.
6. Mempromosikan kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan paling rentan.<sup>141</sup>

Dalam berperan dalam arsitektur keuangan internasional diharapkan Jepang dapat memperkuat dan mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional dengan melakukan efisiensi dengan alokasi tabungan dan efisiensi investasi global yang saling menguntungkan, transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga

<sup>138</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/13/EKONOMI/peme13.htm>

<sup>139</sup> Sueo Sudo, *Op Cit*, hal. 7

<sup>140</sup> <http://www.mofa.go.jp/>

<sup>141</sup> *Ibid.*

keuangan internasional, menilai/ mengawasi faktor kecukupan modal, memfasilitasi pertukaran informasi, menguji kelayakan dan kepatutan direktur dan pemegang saham utama usaha-usaha skala besar dan meningkatkan pengawasan di negara-negara berkembang untuk fundamental ekonomi yang lebih baik lagi serta memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, pasar tetap terbuka untuk barang dan modal yang dapat membuat perekonomian global lebih tahan terhadap guncangan dan memperkuat potensi untuk menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan.

#### IV. 3 Kepentingan Keamanan Jepang

Dilihat dari segi keamanan dan kestabilan politik maupun pertahanan Indonesia, Jepang memiliki kepentingan dengan adanya dan terciptanya stabilitas keamanan, sosial dan politik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jalannya roda perekonomian suatu negara akan terganggu apabila tidak ada kestabilan dalam politik, sosial maupun keamanan. Bagi Jepang, adanya pengelompokan regional dan kerjasama berbasis regional memberikan beberapa keuntungan politik, ekonomi maupun keamanan. Salah satu yang menonjol dalam bidang politik dengan adanya kerjasama dan bantuan yang diberikan terhadap Indonesia adalah dengan adanya kesamaan jalan pembangunan yang non komunis atau anti komunis yang juga dalam hal ini ekonomi maupun bisnisnya selalu berpihak kepada barat. Dengan demikian akan tercipta peluang untuk menjalankan perekonomian atas dasar perpaduan antara kendali pemerintah dan keleluasaan bergerak dalam pasar bebas.<sup>142</sup>

Stabilitas politik wilayah non komunis sangat penting bagi Jepang karena stabilitas politik merupakan dasar pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan stimulus perdagangan Jepang dan dapat membuka pasar yang stabil bagi produk-produk ekspor mereka. Selain itu posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di perairan selat malaka merupakan jalur perdagangan dan jalur bagi pengiriman minyak bumi ke Jepang merupakan faktor yang menjadi pertimbangan bahwa dengan adanya kemananan dan kestabilan politik yang ada di Indonesia dapat menjamin kelancaran bagi pasokan energi minyak bumi, gas, batubara terhadap

<sup>142</sup> DEPLU RI BALITBANG, *Kebijakan Dasar Jepang Terhadap ASEAN*, Jakarta, Laporan Tahun 1997.

Jepang, sebagai contoh Jepang menyerap sekitar 70% pasar minyak bumi Indonesia.<sup>143</sup>

Sebagai penyuplai utama minyak bumi dan gas alam ke Jepang. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis dan penting bagi transportasi laut Jepang yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok.<sup>144</sup> Selat-selat tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk kelancaran suplai minyak bumi dan gas alam dari seluruh dunia.<sup>145</sup> Krisis yang melanda Indonesia menimbulkan berbagai efek domino, kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok, meningkatnya pengangguran, rawannya kerusuhan hingga munculnya aksi penjarahan merupakan dampak dari krisis yang melanda Indonesia. Dengan adanya berbagai kerusuhan membuat kalangan pebisnis Jepang khawatir akan ketidakpastian usaha dan investasi mereka, dengan adanya bantuan ekonomi yang diberikan Jepang setidaknya berbagai hal negatif tersebut dapat dikurangi dan harapan Jepang akan terwujudnya situasi yang kondusif bagi kemajuan iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat tercapai. Selain itu dengan amannya wilayah Indonesia juga membuat nyaman para diplomat, pengusaha Jepang maupun masyarakat Jepang dan pelajar Jepang yang berada di Indonesia.

Dilihat dari segi sejarah, terdapat istilah Pan Asianisme yang artinya solidaritas dan kerjasama antar sesama negara-negara Asia.<sup>146</sup> Dalam hal ini Jepang ingin memberikan pengaruh di kawasan Asia sesuai dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasionalnya. Dengan adanya Pan Asianisme Jepang ingin mempererat dan menumbuhkan solidaritas regional kawasan Asia dengan Jepang sebagai pemimpinya. Dengan adanya bantuan ekonomi yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, juga turut menjaga citra baik Jepang di mata dunia internasional.

---

<sup>143</sup> Syamsul Hadi, Op Cit, hal 329.

<sup>144</sup> Ramses Amer, *Towards a Declaration on Navigational Right in The sea Lines of The Asia Pacific*, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29 no1 April 1998, hal.93.

<sup>145</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam era Dinamika Global* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal. 348.

<sup>146</sup> .Hatsusei Ryuhei, *Pan Asianism in Modern Japanese History* (London and New York: Roulledge, 2003 ), hal. 1.

**Tabel IV. 13**  
**Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia**

<b>Kepentingan Ekonomi</b>	<b>Kepentingan Keamanan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan investasi Jepang di Indonesia</li> <li>- Memperbaiki nilai ekspor dan impor Jepang terhadap Indonesia</li> <li>- Memperbaiki masalah penjualan, penurunan produksi dan pasar domestik Jepang di Indonesia</li> <li>- Mempertahankan Indonesia sebagai bagian elemen ekonomi Jepang</li> <li>- Mendapatkan tenaga kerja dan biaya produksi murah.</li> <li>- Mendapatkan sumber- sumber alam (minyak, gas, kayu, dan lain sebagainya) yang tersedia di Indonesia</li> <li>- Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar lokal dan internasional bagi produk-produk Jepang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan jalur untuk pengiriman minyak bumi dan berbagai bahan energi dari Timur Tengah maupun kawasan lainnya di dunia ke Jepang karena letak strategis Indonesia (Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok) .</li> <li>- Memberikan keamanan dan kestabilan politik di Indonesia sehingga memberikan rasa nyaman bagi para diplomat, pengusaha, pelajar dan warga negara Jepang yang ada di Indonesia</li> </ul>

## BAB V KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat terlihat bahwa Jepang sangat berkepentingan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia, hal ini terlihat dari adanya berbagai bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, dalam hal ini Jepang berinisiatif untuk memberikan bantuan untuk pemulihan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dari data yang ada ditemukan bahwa Jepang memiliki kepentingan dalam membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Adanya kepentingan Jepang dalam operasional perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, target pasar dan dengan membaiknya perekonomian Indonesia, ekonomi Jepang juga terkena dampak positifnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa krisis Asia yang dimulai pada tahun 1997 memiliki dampak sistemik. Berdasarkan analisa dan data dari bab-bab sebelumnya dapat terlihat bahwa Jepang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di Indonesia pada masa krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Adapun berbagai indikatornya antara lain menurunnya volume ekspor, impor, investasi langsung Jepang terhadap Indonesia dan kredit macet bank Jepang yang membiayai perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu adanya konversi piutang menjadi kepemilikan saham (debt to equity swap) atas sebagian piutang perusahaan Jepang, Marubeni, menjadi 20 persen kepemilikan di perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Centre (CAPC), merupakan sebuah politik tingkat tinggi tekanan pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan hal ini disebut *Japanese Inc (Incorporation)* yang merupakan persekutuan kapitalisme gurita pengusaha dan pemerintah Jepang untuk mempertahankan hegemoni mereka, baik di dunia internasional maupun dalam hal bisnis lintas batas Jepang.

Kebijakan luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah sebuah rencana dan strategi tindakan suatu negara yang dibuat oleh pembuat kebijakan dalam kaitan untuk berhadapan dengan negara lain ataupun entitas internasional,

rencana tersebut secara khusus menyertakan tujuan yang jelas dalam konteks menjaga kepentingan nasional.

Menurut Graham Modelski, kebijakan luar negeri adalah sistem tingkah laku suatu negara yang dilakukan negara untuk merubah perilaku negara lain dan untuk mengatur serta menyesuaikan tingkah laku negara tersebut dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Jepang berupa *ODA/ Miyazawa plan* merupakan strategi dari Jepang dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dengan pulihnya perekonomian Indonesia akan memungkinkan Jepang untuk dapat meningkatkan kembali volume ekspor maupun investasinya terhadap Indonesia. Peningkatan kegiatan ekspor terhadap Indonesia sangat penting bagi perekonomian Jepang yang pertumbuhan ekonominya sangat mengandalkan kegiatan ekspor.

Dalam melihat mengenai lebih besarnya jumlah pinjaman dibandingkan dengan hibah dan bantuan teknis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak sejajar antara Indonesia dengan Jepang sebagai pemberi hutang. Adanya wacana penghapusan hutang merupakan suatu hal yang sebaiknya diperjuangkan.

Dalam hal ini, besarnya hutang luar negeri suatu negara merupakan indikator dari lemahnya perekonomian suatu negara selain itu juga dengan besarnya hutang luar negeri memungkinkan negara pendonor untuk mendikte suatu keadaan maupun suatu kebijakan dari negara penerima donor yang dapat mengakibatkan sikap tidak independen suatu negara. Oleh karena itu dengan adanya penghapusan hutang luar negeri diharapkan dapat menjadi pemicu untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Berbagai bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia merupakan bentuk dukungan dan bantuan untuk investasi Jepang di Indonesia, hal ini dikarenakan bantuan tersebut juga terkait dengan investasi Jepang yang ada di Indonesia serta adanya dominasi Jepang dalam menentukan bantuan yang harus diprioritaskan serta disalurkan. Jepang merupakan negara yang dikenal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di wilayah Asia.

Selain itu berbagai bantuan Jepang juga terkait dengan kepentingan keamanan Jepang di Indonesia. Jalannya roda perekonomian suatu negara akan terganggu apabila tidak ada kestabilan dalam politik, sosial maupun keamanan.

Bagi Jepang, adanya pengelompokan regional dan kerjasama berbasis regional memberikan beberapa keuntungan ekonomi dan keamanan. Salah satu yang menonjol dalam bidang keamanan, dengan adanya kerjasama dan bantuan yang diberikan terhadap Indonesia adalah adanya jaminan kesamaan jalan pembangunan yang non komunis atau anti komunis yang juga dalam hal ini ekonomi maupun bisnisnya selalu berpihak kepada barat. Dengan demikian akan tercipta peluang untuk menjalankan perekonomian atas dasar perpaduan antara kendali pemerintah dan keleluasaan bergerak dalam pasar bebas. Selain itu letak Indonesia yang strategis dengan adanya Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan jalur untuk pengiriman minyak bumi dan berbagai bahan energi dari Timur Tengah maupun kawasan lainnya di dunia ke Jepang.

Implementasi ODA Jepang juga tidak luput dari kritik. David Arase memaparkan bahwa Jepang menggunakan ODA sebagai alat *buying power* atau membeli kekuasaan. Arase juga menggunakan istilah asli di Jepang untuk menyebut ODA yaitu *keizai kyouryoku* (kerjasama ekonomi), untuk memperlihatkan bahwa Jepang tidak melihat ODA sebagai bantuan (*aid/assistance*), tapi merupakan kerjasama ekonomi yang sarat dengan kepentingan bisnis dan ekonomi Jepang.

Dengan adanya bantuan ekonomi yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, juga turut menjaga citra baik Jepang di dunia internasional. Dengan amannya wilayah Indonesia juga membuat nyaman para diplomat, pengusaha Jepang maupun masyarakat Jepang dan pelajar Jepang yang sedang menuntut ilmu di Indonesia untuk tinggal di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari tesis ini, hipotesa mengenai adanya kepentingan ekonomi dan keamanan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dikatakan terbukti.

Dalam hal ini setelah mengetahui penyebab dari krisis Asia sudah seharusnya pemerintah untuk dapat mengambil pelajaran dalam hal hutang swasta, kredit macet hingga kebijakan moneter, dan apabila dimungkinkan ada lembaga khusus selain dari Bank Indonesia yang bertugas untuk menangani masalah moneter di Indonesia. Selain itu, upaya untuk memutihkan/menghapuskan hutang luar negeri Indonesia juga sudah seharusnya

diperjuangkan. Dalam tataran teori mempelajari dan meneliti kepentingan Jepang di masa krisis finansial global juga dapat diperhatikan. Dalam wacana teori juga dapat diteliti mengenai perlunya mata uang regional Asia dengan membandingkannya melalui keadaan ekonomi negara-negara di Eropa setelah pemberlakuan mata uang Euro dan motivasi Turki untuk menjadi anggota masyarakat Eropa.

Dilihat dari sisi sejarah, Jepang sudah lama mengetahui akan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini, kebutuhan Jepang dalam memperkuat pembangunan dalam negerinya merupakan suatu bagian dari kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional Jepang.

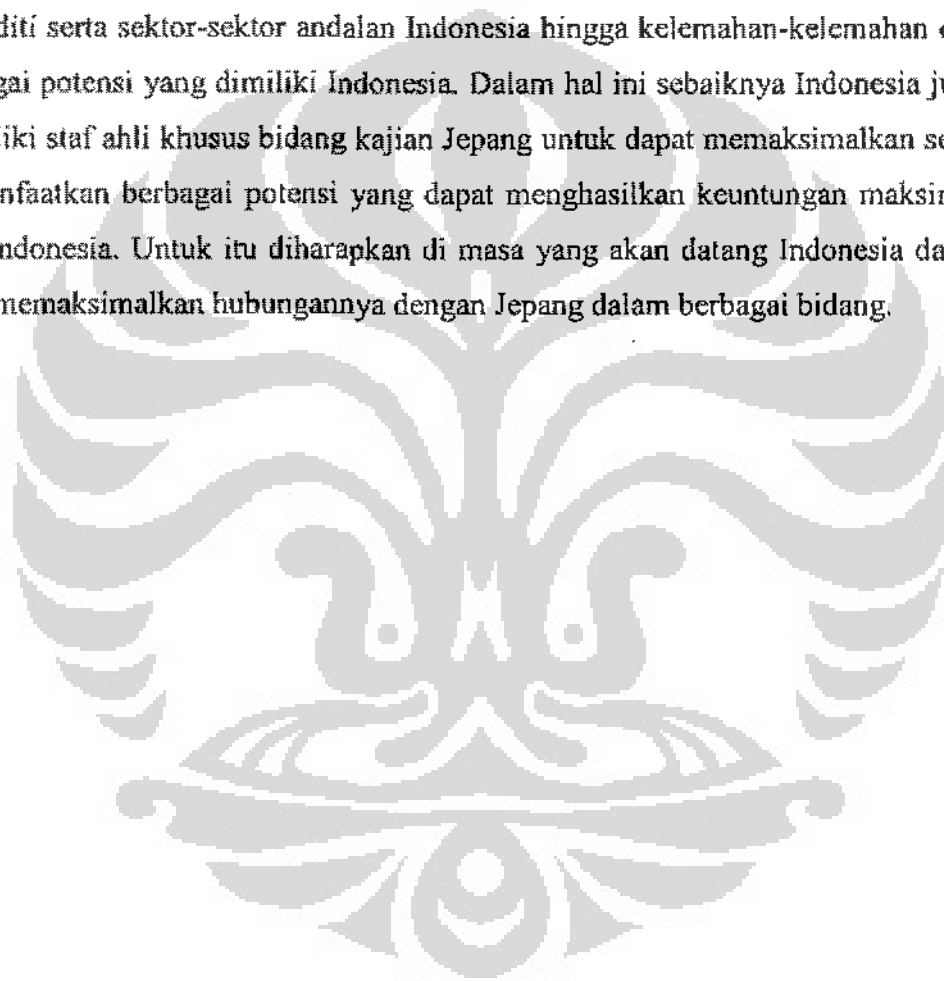
Krisis Asia dalam hal ini terindikasi disebabkan karena berbagai hal, antara lain adanya kelalaian dari para pelaku ekonomi, *mismanagement* dari para birokrat negara, tidak terkontrolnya hutang pemerintah maupun swasta, dan lain sebagainya. Dalam mengantisipasi agar dikemudian hari tidak terjadi krisis serupa, diharapkan adanya koordinasi yang menyeluruh dari semua elemen masyarakat Indonesia dan perlu dibentuknya lembaga semacam lembaga moneter khusus selain dari Bank Indonesia untuk mengontrol dengan ketat peredaran dan arus keluar masuk uang agar cadangan devisa dan uang yang beredar dapat terkontrol serta adanya pembatasan informasi mengenai keuangan. Sehingga apabila ada kemungkinan krisis serupa akan terjadi lagi dapat segera diantisipasi. Dalam hal ini diperlukan pengawasan dan penanganan yang lebih khusus lagi.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya bisa dikatakan segalanya ada, untuk itu diperlukan pemberdayaan bagi seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada agar bisa menjadi negara maju. Diperlukan sistem pendidikan, kesehatan, sosial yang baik dan moral yang ditanamkan sejak dini agar bisa menjadi bangsa yang maju, cinta tanah air, dan berjiwa patriot. Dalam hal ini dimungkinkan untuk membuat sebuah "*blueprint dan infrastruktur*" sosial yang bisa menjadikan sesama bangsa Indonesia saling mengayomi.

Jepang merupakan negara yang sangat teliti dalam segala hal. Ahli-ahli Jepang yang juga merupakan pakar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia sangat mengetahui kebudayaan, kemampuan, visi, misi, perdagangan hingga pada tingkat pedesaan. Dalam hal ini, menurut pengalaman penulis



terdapat pakar Jepang yang ahli dalam bidang militer Indonesia, ekonomi Indonesia, partai politik Indonesia, karakteristik bangsa Indonesia sehingga dengan mudah bagi para pakar tersebut untuk dapat mencapai kepentingan Jepang guna mencapai tujuan nasionalnya (melakukan *erabi*). Bisa dikatakan Jepang juga memiliki staf ahli khusus mengenai Indonesia. Jepang dalam hal ini memiliki ahli-ahli yang dapat mengetahui aliran masuk, perdagangan senjata, komoditi-komoditi serta sektor-sektor andalan Indonesia hingga kelemahan-kelemahan dan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini sebaiknya Indonesia juga memiliki staf ahli khusus bidang kajian Jepang untuk dapat memaksimalkan serta memanfaatkan berbagai potensi yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal bagi Indonesia. Untuk itu diharapkan di masa yang akan datang Indonesia dapat lebih memaksimalkan hubungannya dengan Jepang dalam berbagai bidang.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Amer, Ramses. (1998). *Towards a Declaration on Navigational Right in The sea Lines of The Asia Pacific*, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29 no.1 April.
- Arase, David. (1995). *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*. London: Line Rienner.
- Babbie, Earl. (2004). *The Practice of Social Resarch 10<sup>th</sup> Edition*. USA: Thompson Learning.
- Basri, Faisal H. (1999). *Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi: Implikasinya Bagi Kerjasama Di Asia Pasifik*, Dalam *Analisis CSIS*, Vol. XXXVIII, no 1.
- Djamin, Zulkarnaen. (1984). *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Fukusawa, Eiji. (1998). *The Effect of The Asian Crisis on The Japanese Economy*. Tokyo: Fuji Research Corp.
- Gie, Kwik Kian. (1996). *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gregory, Gene. (1982). *Hubungan Manusia Dalam Perusahaan Jepang*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Gilpin, Robert. (1981). *War and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Hadi, Syamsul. (2005). *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia dari Yayasan Pelangi dibantu Japan Foundation.
- H.W. Arndt & Halhill. (1999). *South East Asia's Economic Crisis: Indonesian Crisis*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (1981). *Hubungan Indonesia Jepang*. Jakarta: Kedubes Jepang.
- Inada, Juici. (1990). *Japan's ODA to ASEAN Countries*. Tokyo: The United Nation University.

- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI.
- Irsan, Abdul. (2005). *Jepang: Politik Domestik, Global, & Regional*. Makasar: Hasanuddin University Press.
- Ishida, Masami. (2000). *Economic Crisis in Indonesia*. Tokyo: JETRO.
- Kelly, Dominic. (2002). *Japan and The Reconstruction of East Asia*. New York: Palgrave.
- Kunio, Yoshihara. (1986). *Japanese Economic Development*. London: Oxford University Press.
- Lee, Edy. (1999). *The Debate on The Causes of The Asian Crisis: Crony Capitalism Versus International System Failure*, dalam *International Politics and Society*, No. 2.
- Lincoln, Edward J. (1993). *Japan's New Global Role*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Lubis, Mochtar. (1981). *Dasar Pikiran Kebudayaan Diplomasi Jepang: Kekuatan Yang Membisu dan Peranan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lubis, Muchtar. (1982). *Jepang: Dulu Dan Sekarang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Morgenthau, Hans J. (1991). *Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace 6th Edition*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masaaki, Gabe. (2003). *Japan and Okinawa*. London and NewYork: RoutledgeCurzon.
- Mauna, Boer. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*. Bandung: Penerbit Alumni
- Mintohardjo, Sukowaluyo. (2001). *BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto*. Jakarta: Riset Ekonomi Sosial Indonesia.
- Modelski, Graham. (1997). *Foreign Policy Decision Making*. New York: St Martin.
- Nisihara, Masashi. (1976). *The Japanese and Soeharto's Indonesia Tokyo Jakarta Relation 1951-1966*. Honolulu: University of Hawaii
- Okita, Saburo. (1991). *Japan's Role in Asia Pacific Cooperation*. USA: American Academy Political and Social Science.

- Olton, Roy and Plano, Jack.C. (1982). *The International relations Dictionary*. Santa Barbara, California: ABC-Clio Inc.
- Orr, Robert M., and Koppel, Bruce M. (1993). *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New era*. The United States of America: Westview Press.
- Paichit, Pasuk Phong. (1990). *The New Wave of Japanese Investment in ASEAN: Determinants and Prospects*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Panglaykim, J. (1983). *Japanese Direct Investment In ASEAN: The Indonesian, Experience*. Singapore: Maruzen Asia.
- Romli, Lili. (2003). *Menggugat Partai Politik*. Depok: LIP FISIP UL.
- Ryuhei, Hatsusei. (2003). *Pan Asianism in Modern Japanese History*. London and New York: Roulledge.
- Sato, Tadashi. (1993). *Japan's Economic Relation With Indonesia*, dalam Japan Economic Institute Report no 22
- Scalapino, Robert A. (1977). *The Foreign Policy of Modern Japan*. London:University of California Press
- Shinjukuhu, Wakaba. (1989). *Jepang Dewasa Ini*. Jakarta: CSIS
- Singh, Bilver. (2000). *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sing, Lim Hua. (1994). *Japan's Role in ASEAN: Issues and Prospects*. Singapore: Times Academic Press.
- Singarimbun, Masri. (1987). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soeharno, Sagir. (1981), *Peranan Bantuan Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PRISMA.
- Soekro, Shinta R.I. (2008). *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur: Satu Dekade Setelah Krisis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sueo, Sudo. (1992). *The Fukuda Doctrine and ASEAN Dimension in Japanese Foreign Policy*. Singapura: Institute of Asian Studies.
- Surajaya, Prof. Dr. I Ketut M.A. (2001). *Pengantar Sejarah Jepang I*. Jakarta.
- Suryadinata, Leo. (1998). *Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.

- Thoha, Mahmud. ( 2002). *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan. Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Winters, Jeffrey A. (1999). *Dosa-Dosa Politik Orde Baru* . Jakarta: Djambatan.
- Asian Currency Crisis and Its Effects on World Trade dalam JETRO White Paper on International Trade (Tokyo: JETRO, 1998).
- Yamazawa, Ippei. (1999). *Strengthening Cooperation Among Asian Economies in Crisis*. Tokyo: JETRO.
- Yukio, Noguchi. (1993). *Bubble Economics*. Tokyo: Nihon Keizai Shinbun.

## 2. Jurnal

- Statistical Profile of Japan's International Transaction in 1997. (1988, December 11). *Japan Economic Institute Report no 46 A*.
- White Paper on Japan International Trade 1997. (1998). Tokyo: *JETRO*.
- G-7 Fails To Take Coordinated Actions Calls on Japan to Solve Financial Problems. (1998, October 9). *Japan Economics Institute Report, No 38B*.
- Laporan Tahunan 1999-2000. KBR1 Tokyo.
- JBIC Review no.1. (2000). Tokyo: JBIC.
- Kebijakan Dasar Jepang Terhadap ASEAN. (Jakarta, Laporan Tahunan 1997). *DEPLURI BALITBANG*, .
- Japanese Financial Support to Thailand and Malaysia under the Framework of The New Miyazawa Initiative. (1999, January). *Japan's Monthly Financial Review, no 306*.
- Japanese Financial Support to Philipines under The Framework of The New Miyazawa Initiative. (1999, March). *Japan's Monthly Financial Review, no 308*.
- Obuchi Kim Pledge Economic Cooperation: Japan Offers US\$3 Bilion in New Loans. (1998, October 16). *Japan instiute Report, no. 39B*.
- Wiratno, Siti Daulah. (1991). *Kebijakan Bantuan Ekonomi Jepang Kepada Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Jurnal Studi Jepang.
- Yano, Toru *The Pasific Basic Cooperation Concept: A Critical Japanese View Point*, dalam US Congress, Joint Economic Commitee, Pacific Region Interdependencies, 97<sup>th</sup> Congress, 1<sup>st</sup> Session, 1981.

### 3. Artikel

Krisis Ekonomi 1998 Tragedi Tak Terlupakan. (1998, December 21). *Kompas*, p.11.

Lonjakan Yen Justru Menyakitkan Jepang. (1993, Februari 26). *Suara Karya*, p.9.

Pemerintah Jepang Desak Bank Ungkap Bad Loan. (1993, November 26). *Bisnis Indonesia*, p. 21.

Zulkarnaen, Happy Bone. (1994, May 6). Kasus Hosokawa dan Etika Politik Jepang. *Merdeka*, p.5.

Simarmata, D (1991, November 18). Spekulasi Tanah dan Pasar Modal Berdampak Crash. *Suara Karya*, p. 7.

Perekonomian Gelembung Sabun pun Meletuslah. (1991, May 3). *Suara Karya*.

Runtuhnya Sektor Properti. (1998, November 23) . *Kompas*, p.5.

Diperlukan Dua Dasawarsa Bagi Bank Jepang Untuk Pulih Dari Bad Loan. (1997, April 4). *Bisnis Indonesia*, p.13.

11 Petinggi Yamaichi Terjerat Skandal Keuangan. (1997, Agustus 12). *Kompas*, p.11.

Rakyat Jepang Tidak Mempercayai Parpol. (1998, May 1). *Kompas*, p.15.

Pinjaman Yen. (1999, July 26). *Kompas*, p.1.

Tahun 1997: Mimpi Buruk Masih Akan Berlanjut. (1997, December, 25). *Tempo*, p.21.

Soal Masuknya Marubeni ke Chandra Asri Pemerintah Jepang Lakukan Politik Tingkat Tinggi. (2000, May 13). *Kompas*, p.15.

Winters, Jeffrey. A. (1997, September 3). *Wall Street Journal*. P. 10.

#### 4. Internet

- (1998, December 21). *Laporan Akhir Tahun: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan*. November 3, 2009.  
[http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm).
- IMF. (1999, January). *The IMF's Responses to the Asian Crisis*. November 25, 2009.  
<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/asia.HTM>.
- (1999, 18-20 June). *Report of G7 Finance Ministers to the Koln Economic Summit*. November 25, 2009.  
<http://www.mofa.go.jp/>.
- Jauhary, Andy. (2008, January 26). *Setengah Abad Hubungan Indonesia- Jepang. Antara*. November 25, 2009.  
<http://www.antara.co.id/print/?id=1201331720>.
- Kedutaan Besar Jepang. (2009). *Data Dasar: Hubungan Diplomatik Jepang-Indonesia*. November 25, 2009.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html).
- (2009). *Dinamika 50 Tahun Hubungan RI-Jepang*. November 27, 2009  
<http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=159766&actmenu=39>.
- Seda, Frans. (2000). *Krisis Moneter Indonesia*. November 27, 2009  
<http://www.indonesiaindonesia.com/f/8533-krisis-moneter-indonesia/>.
- (2009, March, 27). *Perekonomian Jepang*. November 27, 2009  
<http://dedeknanik.blogspot.com/2009/03/perekonomian-jepang.html>.
- ODA. (2009). *ODA Profile*. November 28, 2009.  
<http://www.jica.go.jp/english/about/oda/>.
- Japan Embassy. (2009). *ODA Data*. November 28, 2009.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/datastat\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/datastat_01.htm).
- ODA. (2009). *ODA Profile*. November 28, 2009.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/vhatisoda\\_01.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/vhatisoda_01.htm)
- (2000). *Prihatin*. November 27, 2009.  
<http://www.indonesiaindonesia.com/f/8533-krisis-moneter-indonesia/>.

- MOFA. (1997). *Pidato PM Ryutaro Hashimoto*. November 27, 2009.  
<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmv9701/indonesia.html>.
- MOFA. (1997). *Ryutaro Hashimoto*. November 28, 2009.  
[http://www.mofa.go.jp/POLICY/economy/apec/1997/rh\\_profile.html](http://www.mofa.go.jp/POLICY/economy/apec/1997/rh_profile.html).
- Fukukawa, Shinji. (1997, November 11). *Development of the Japanese Big Bang and its Impact*. November 28, 2009.  
<http://brie.berkeley.edu/research/forum/fukukawa.html>.
- (1999). *Bantuan Beras Jepang*. December 1, 2009.  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/09/EB/mbm.19990209.EB93436.id.html>.
- JICA. (2009). *JICA Profile*. November 28, 2009.  
<http://www.jica.go.jp/english/>
- DAC. (2009). *DAC Profile*. November 28, 2009.  
<http://www.oecd.org/dac/>
- JBIC. (2009). *JBIC Profile*. November 28, 2009.  
[http://www.jbic.or.id/id/profile\\_2.php](http://www.jbic.or.id/id/profile_2.php)
- ODA. (2009). *Pinjaman Yen*. January 2, 2010.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_loan.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm)
- ODA. (2009). *Kerjasama Teknik*. January 2, 2010.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_protech.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_protech.htm)
- ODA. (2009). *Bantuan Hibah*. January 2, 2010.  
[http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects\\_grant.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_grant.htm)
- (2000, July 18). *Jepang Tidak Akan Tinggalkan Indonesia*. December 4, 2009.  
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/12/0020.html>

## 5. Seminar

- Kusaoka, Sadanobu. (2008, October 14). *JETRO: Japanese Investment in Indonesia Past and Future*. Presentasi makalah seminar Jakarta Japan Club dan Post Graduate Program Japanese Area Studies Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.